



# Jiwaraga

Jendela Informasi Wakil Rakyat Salatiga

Edisi III Tahun 2014



**Bangunlah Jiwanya**

**Menguak Revolusi Mental Indonesia**

Diterbitkan oleh :  
Humas Sekretariat DPRD Kota Salatiga



Foto: budi's

## Rapat Paripurna Pengucapan Sumpah Janji Pimpinan DPRD

**P**engambilan Sumpah janji pimpinan DPRD Kota Salatiga masa bakti 2014-2019 digelar di Ruang Bhineka Tunggal Ika Gedung DPRD, Rabu (24/9).

Acara tersebut dihadiri Walikota Salatiga Yuliyanto serta anggota Forkopinda maupun seluruh anggota DPRD Salatiga.

Pelantikan yang dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri (PN) Kota Salatiga Djoni W. berlangsung khitmat.

Adapun yang dilantik, Ketua DPRD Milhous Teddy Sulistiyo, SE (PDI Perjuangan), Wakil Ketua H. M Fathur Rahman SE, MM (PKS) serta Ir. Hj. Diah Sunarsasi (Partai Gerindra, yang juga mantan Wakil Walikota Salatiga).

Setelah pengambilan sumpah janji pimpinan, DPRD Kota Salatiga harus kejar tayang untuk memulai kinerjanya. termasuk yang harus segera dibentuk adalah alat kelengkapan dewan. (ss/ljf)



Foto: budi's



- 4 **Redaksi:** Tiga Pahlawan dari Salatiga
- 6 **Mimbar:** Bangunlah Jiwaraga, Menguak Revolusi Mental Indonesia; Pembinaan Remaja Tanggungjawab Semua Elemen; Pengawasan DPRD Perlu Dukungan Tenaga Profesional.
- 10 **Laporan Utama:** Standar Pelayanan Maksimal untuk Kesehatan; Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Perlu Dipertajam; Mendukung Penuh Kegiatan Pengawasan; Mengkonfirmasi Rencana Kegiatan Lewat Musrenbang; Hasil Pembangunan harus Bisa Dimanfaatkan Masyarakat; Badan Kehormatan, Penegak Aturan dan Tata Tertib Dewan.
- 22 **Artikel:** Drumblek Kesenian Asli Salatiga “dari Salatiga untuk Indonesia”.
- 24 **Opini:** Laksanama Muda TNI Yosaphat Sudarso.
- 26 **Wacana:** Siapa Mendengar Radio Suara Salatiga ?.
- 28 **Warta:** Seputar kegiatan anggota DPRD Kota Salatiga.
- 33 **Profil:** Arfian Fuadi dan Arie Kurniawan berhasil Mendesain *Jet Engine Bracket*
- 34 **Rileks:** Tebak Wajah Jiwaraga 24.

## Karikatur



# Tiga Pahlawan dari **SALATIGA**

**B**angsa yang besar, adalah bangsa yang menghargai jasa pahlawannya. Di Salatiga, tepatnya berada di jantung kota yang memungkinkan setiap hari dilihat atau dilewati, namun nampaknya tidak banyak warga Salatiga yang mengetahui bila patung yang berada di Bundaran Lapangan Pancasila adalah para pahlawan nasional yang berasal dari Salatiga.

Sayang sekali jika generasi muda sekarang lupa akan perjuangan para pahlawan kusuma bangsa yang sudah mempertaruhkan jiwa & raga demi kemerdekaan bangsa Indonesia.

Meski Salatiga kota kecil, tapi bukan berarti tidak ada pahlawan dari kota Salatiga. Salah satu penghormatan atas pengabdian pahlawan, dibangunlah sebuah monumen / patung pahlawan dari Salatiga, tepatnya di Lapangan Pancasila.

Lapangan Pancasila Salatiga, adalah Pusat Kota Salatiga. Di sebelah timur ada Kantor Pemkot Salatiga & Kantor DPRD kota Salatiga. Di sebelah barat ada Masjid dan Kampus STAIN Salatiga.

Sayang, nampaknya tidak banyak warga Salatiga yang mengetahui bila patung yang berada di Bundaran Lapangan Pancasila adalah para pahlawan nasional yang berasal dari Salatiga.

Ketiga pahlawan tersebut adalah sosok dari Brigjen Sudiarto, Laksamana Madya Yosaphat Soedarso dan Marsekal Muda Agustinus Adisucipto (dalam ejaan lama, namanya ditulis Adisutjipto)

Dari ketiga pahlawan itu, sosok dan kisah Brigjen Sudiarto yang mungkin jarang diketahui, sedangkan Adisucipto dan Yos Sudarso sendiri berasal dari Kelurahan Salatiga, Kecamatan Sidorejo. Bahkan rumah orang tua Yos Sudarso saat ini masih. Letaknya berada di Jalan Yos Sudarso, Sidorejo. Oleh Pemerintah Kota Salatiga, selain dibuat tugu pahlawan nama ketiga pahlawan nasional tersebut juga diabadikan sebagai nama ruas jalan di Kota Salatiga.



Tugu Pahlawan di Kota Salatiga

## Jiwaraga

Jendela Informasi Wakil Rakyat Salatiga

Redaksi

Diterbitkan oleh : **SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA.**

**PENASEHAT** : Ketua DPRD, M. Teddy Sulistio, SE; Wakil Ketua DPRD, M. Fathur Rahman, SE., MM; **PEMBINA** : Wakil Ketua DPRD, Ir. Hj. Diah Sunarsasi; **PENGARAH** : Sekretaris DPRD : Dra. Endang Dwi. W, M.Pd; **PEMIMPIN REDAKSI** : Kepala Bagian Humas, Rumah Tangga dan Perpustakaan, Kukuh Ngudiono, SIP; **REDAKTUR PELAKSANA** : Kepala Sub Bagian Humas, Budi Susilo, S.Sos; **KOORDINATOR LIPUTAN** : Inna Kartikasari, S.Pt, MM; **PELIPUT/PENYUNTING** : Ign. Budi Kristiawan, Esti Priyanti, Lukman Fahmi, S.HI, Dwi Kadarsih, Devyna Kristiyani; Sudibyo, Fatih Ashthifani, Hari Oktavia; **SETTING & LAY OUT** : Putra Karya Offset; **DISTRIBUSI** : Warsono Putro Karyono; Udiono, Kusno dan distributor Kelurahan se-Kota Salatiga; **ALAMAT REDAKSI** : SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA, Jl. Letjend. Sukowati No. 51 Salatiga 50731 Telp/Fax. (0298) 326674.

Redaksi menerima sumbangan naskah, tulisan, karikatur. Redaksi berhak mengubah atau mengedit tanpa menghilangkan esensinya. Tulisan/naskah yang dilengkapi foto dialamatkan ke Humas Sekretariat DPRD Kota Salatiga Jl. Letjend. Sukowati 51 Salatiga, atau ke email: [majalahjiwaraga@gmail.com](mailto:majalahjiwaraga@gmail.com). Bagi yang dimuat, akan mendapat imbalan.

## Bolehkah Pinjam Space Baliho DPRD ?

**S**elama ini saya melihat ada beberapa titik baliho milik kantor DPRD Kota Salatiga terpasang di beberapa tempat strategis. Yang ingin saya tanyakan apakah titik-titik baliho tersebut dapat dipinjam warga untuk keperluan publikasi tertentu ?. Jika diperbolehkan apakah syaratnya serta bagaimana prosedurnya.

Demikian yang bisa saya sampaikan kepada redaksi majalah Jiwaraga, dengan harapan mendapat jawaban sesuai dengan harapan saya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih.

**Suryanto, Kauman Kidul  
Salatiga**

## Mekanisme Peminjaman Space Baliho DPRD

**D**ewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Salatiga melalui sekretariat DPRD memiliki lima space baliho dengan berbagai ukuran. Kesemua Space baliho tersebut lama ini digunakan untuk kepentingan publikasi kegiatan DPRD, selain itu juga digunakan untuk mempublikasikan potensi yang ada di Kota Salatiga.

Apabila masyarakat membutuhkan space baliho tersebut untuk keperluan publikasi yang bersifat kemasyarakatan dan berhubungan dengan pelayanan umum serta tidak bersifat komersial maka DPRD Salatiga memperbolehkan space tersebut untuk dipinjam. Adapun lokasi dan ukuran space baliho tersebut adalah :



**Space Baliho DPRD, di Lapangan Pancasila Salatiga.**

disamping SD Kalicacing Salatiga, tepatnya di pertigaan menuju stadion Triganggo. Adapun ukuran space baliho ini adalah 5 meter x 8 meter.

5. Perempatan Pulutan.

Di sepanjang Jalan Lingkar Salatiga DPRD juga memiliki space baliho yang tepatnya di Dukuh Pulutan. Adapun ukurannya adalah 5 meter x 8 meter.

6. Depan BBI Salatiga.

Kedepan, DPRD Salatiga akan memasang space baliho dengan ukuran 5 meter x 9 meter di depan kantor BBI (balai Benih Ikan) Salatiga

Adapun cara peminjamannya adalah mengirim surat permohonan pinjam space baliho Sekretariat DPRD Kota Salatiga ditujukan kepada Ketua DPRD Kota Salatiga. Dalam peminjaman space baliho ini masyarakat tidak dipungut biaya apapun. Selain itu, DPRD Kota Salatiga juga memiliki beberapa ruang pertemuan yang juga bisa dipergunakan untuk kepentingan masyarakat umum. Demikian yang bisa kami sampaikan semoga bermanfaat.

**Redaksi**

# Bangunlah Jiwanya

## Menguak Revolusi Mental Indonesia



Foto: boedy's

**M. Teddy Sulistio, SE**

**B**erbicara tentang tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia ke depan, yang saat ini yang harus dibenahi adalah mental pesimisme yang menggerogoti bangsa. Salah satu yang sangat penting adalah revolusi mental dari negativisme ke positivisme. Dengan begitu, program yang berkonsep revolusi mental untuk bangsa kita tercinta ini sangat diperlukan melalui kebijakan yang tepat untuk merubahnya.

Menurut M. Teddy Sulistio, SE Ketua DPRD Kota Salatiga periode 2014-2019 yang baru saja dilantik, revolusi mental merupakan bagian dari revolusi ideologi. "mestinya revolusi ideologi dulu, bukannya revolusi mental. Revolusi mental itu adalah bagian dari revolusi ideologi". katanya.

Jika Presiden terpilih Jokowi pernah menyampaikan bahwa revolusi mental adalah hal pertama yang akan menjadi perhatiannya, maka Bung Teddy mengusulkan bahwa sebelum melaksanakan revolusi mental perlu dilakukan revolusi ideologi.

"Kenapa pencipta lagu kebangsaan Indonesia Raya Wage Rudolf Supratman ketika membuat lagu Indonesia Raya yang dijadikan sebagai lagu kebangsaan kita pada salah satu baitnya sengaja ditulis *bangunlah jiwanya - bangunlah badannya* ?.

Berarti idealnya membangun suatu bangsa berarti kita harus membangun jiwa dulu bukan badan.

Itulah yang menjadi tanda tanya besar baginya. "Dari beberapa referensi yang saya peroleh, saya mendapatkan penjelasan bahwa ketika kita ingin membangun badan, kita harus terlebih dahulu harus membangun jiwa" tambahnya.

"Contoh ketika kita ingin hidup sehat, maka kita harus mengetahui cara hidup sehat. Dengan kata lain, apabila kita ingin melakukan hal yang benar maka kita harus memahaminya dengan benar pula. Jika dikaitkan dengan Negara, ketika Indonesia ingin melaksanakan pembangunan, baik pembangunan fisik, ekonomi, sosial budaya dan lain sebagainya, seharusnya terlebih dahulu dilakukan pembangunan jiwa seluruh rakyat termasuk para pemimpin bangsa Indonesia berdasarkan nilai-nilai Pancasila tentunya, dan bukan nilai-nilai yang lain" paparnya.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa nilai-nilai Pancasila harus menjadi dasar utama, Ketuhanan Yang Maha Esa harus menjadi pemersatu bangsa, bukan agama justru menjadi alat pemecah belah. Kemanusiaan yang adil dan beradab harus tanpa memandang ras, keturunan dan warna kulit, serta bersifat *universal* dalam rangka mempersatukan Indonesia, bukan malah tidak mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan persamaan kewajiban antara sesama manusia yang ujung-ujungnya memecah belah persatuan bangsa.

Selain itu, kesepakatan-kesepakatan bisa kita

lakukan lewat musyawarah untuk mufakat seperti mimpi para pendiri-pendiri bangsa ini. “sekarang yang terjadi adalah rakyatnya adem-ayem, sementara elit politiknya bermanuver seperti dunia mau kiamat” katanya.

Menurut Ketua DPC PDI Perjuangan Salatiga ini, jika masih terdengar jerit tangis rakyat, yang selalu bertanya “besok makan apa, bagaimana besok membayar sekolah anak-anaknya, dan besok bekerja apa?”, maka keadilan sosialpun masih perlu kita pertanyakan. Gotong royong yang merupakan saripatinya komitmen leluhur bangsa sangat kita butuhkan, kalau semua hanya berjuang untuk diri sendiri bukan untuk kebersamaan maka Indonesia tidak akan berumur panjang.

### Revolusi Ideologi

Menurut Milhous Teddy Sulistio, SE untuk melakukan revolusi mental harus punya dasar. Mental berdasarkan apa? Mental berdasarkan ajaran apa? Mental berdasarkan paham apa? Mental berdasarkan ideologi apa?

Kalau revolusi mental itu punya dasar pastilah kita akan menggunakan ideologi Pancasila sebagai dasarnya, apalagi ditengah-tengah anak-anak bangsa ini tidak semuanya menggunakan Pancasila sebagai “*the way of live*”, dan ditengah-tengah anak-anak bangsa yang mengaku menggunakan Pancasila sebagai roh pergerakan tetapi tidak mengimplemen-tasikannya secara benar.

Sehingga bisa dikatakan bahwa revolusi mentalnya sang ideolog sejatinya adalah revolusi ideologi. Revolusi ideologi yang damai, revolusi tanpa darah, dan air mata. Revolusi untuk anak cucu bangsa dan revolusi yang tetap bertanggungjawab terhadap sebuah konstitusi Indonesia yang Raya. Karena hanya dengan mempunyai mimpi yang sama, harapan yang sama, cara yang sama, pondasi yang sama maka konstruksi bangunan yang disebut sebagai Indonesia bisa dibangun.

Indonesia dirancang oleh “arsitek agung” bernama Bung Karno. Mimpi seorang arsitek tidak mungkin bisa diwujudkan kalau penerusnya tidak memahami mimpi pendahulunya. Sebagai sesama anak kandung ideologis dan sebagai sesama kader ideologis, saya meyakini bahwa jayanya bangsa ini akan terwujud jika penerusnya memahami dan meyakini ajaran Bung Karno, sehingga kita bisa meneruskan relief kebangsaan, relief kenegaran, relief kemanusiaan, relief harga diri dan relief martabat suatu bangunan ideologi.

Pemimpin kita tidak harus dari kalangan darah biru, pengusaha konglomerat, namun harus mampu melejit menembus batas kesakralan kekuasaan, menembus kapitalisasi kekuasaan dengan rendah hati, bersahaja dan tulus. Harus mampu

mengabdikan diri untuk kepentingan pertiwi, karena tangan midas pemimpin kita adalah kehendak rakyat, yang akan menjadikan Indonesia kembali

berjaya seperti ketika Prabu Brawijaya memimpin kerajaan Majapahit yang kekuasaannya terbentang dari Semenanjung Malaya bahkan sampai ke Madagaskar.

Memang, revolusi mesti punya kawan dan punya lawan, dan kekuatan-kekuatan Revolusi harus tahu siapa lawan dan siapa kawan, maka harus ditarik garis pemisah yang terang dan harus diambil sikap yang tepat terhadap kawan dan terhadap lawan Revolusi. Maka saya berharap agar pemimpin kita dapat menjadikan lawan persis seperti kawan, apalagi kawan. Karena hanya dengan begitulah kebangunan relief Indonesia Raya akan terwujud.

Sekali lagi kita butuh revolusi ideologi yang damai, revolusi tanpa darah, tanpa air mata. Revolusi yang benar-benar Revolusi bukanlah “revolusi istana” atau “revolusi pemimpin”, melainkan Revolusi Rakyat; oleh sebab itu revolusi tidak boleh “main atas” saja, tetapi harus dijalankan dari atas dan dari bawah, bukan untuk sebagian golongan, sebagian agama, namun semua untuk semua.

Revolusi sangatlah perlu dilakukan, karena revolusi adalah simfoninya destruksi dan konstruksi, simfoninya penjebolan dan pembangunan, karena destruksi atau penjebolan saja tanpa konstruksi atau pembangunan adalah sama dengan anarki, dan sebaliknya, konstruksi atau pembangunan saja tanpa destruksi atau penjebolan berarti kompromi, reformisme.

Kita membutuhkan “Sang Ideolog” di bumi kapitalis, di bumi hedonisme, di bumi individualistis tempat dulu para pendiri bangsa ini memimpikan semangat kegotong royongan, tempat dimana semangat “*holobis kuntul baris, saiyeg saeka praya, bebarengan mrantasi gawe*” dengan maksud bekerja bersama-sama dengan gotong royong.

Apabila revolusi Ideologi bisa diwujudkan, maka Indonesia akan kembali pada kemegahan dan kemasyuran jaman Patih Gajah Mada. Indonesia akan kembali hebat dengan Garuda Pancasila yang sakti dan ke-bhinneka-an yang tunggal ika-nya serta *tan hana dharmamangrwa*-nya.

Indonesia akan disegani di percaturan bangsa-bangsa didunia, rakyatnya akan sejahtera, damai tanpa diskriminasi. Indonesia yang penuh budi pekerti, Indonesia yang tidak munafik. Indonesia yang merah putih! sehingga sang proklamator bisa tersenyum bangga disamping Tuhannya.

“Ini bukan hal yang mudah, ini adalah pertarungan ideologi melawan persekongkolan bagi-bagi kekuasaan, ini revolusi ideologi, ini revolusi rakyat. Revolusi yang saling bergandeng tangan, saling memaafkan, saling mengisi, saling asah, asih, asuh. Revolusi yang menjadikan kekayaan kita untuk bangsa kita sendiri bukan untuk bangsa lain. Revolusi yang penuh ke-Indonesia-an”.

“Semoga Tuhan menolong Indonesia!”,  
pungkasnya. (ss/lf)



Foto: boedy's

**M. Fathur Rahman, SE. MM**

## Pembinaan Remaja Tanggungjawab Semua Elemen

**K**aum Remaja memerlukan pembinaan dan pengembangan kearah yang lebih baik, agar dapat ikut serta dalam mengisi pembangunan yang kini sedang berlangsung. Remaja kita sangat beraneka ragam, dalam proses pertumbuhan dan perkembangannya biasanya menghadapi berbagai permasalahan yang perlu diupayakan penanggulangannya dengan melibatkan semua pihak.

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi kaum remaja antara lain penataan kehidupan remaja agar mereka mampu melaksanakan peranan yang penting dalam masa depannya, bahwa masa depan tersebut tidak berdiri sendiri, dan mereka dapat menjadi generasi muda yang membanggakan bangsa dan negara.

Hal ini diakui oleh Wakil Ketua DPRD Salatiga, M. Fathur Rahman, SE., MM. Menurutnya semua elemen masyarakat perlu peduli terhadap pembinaan remaja, "Wajah negeri ini kedepan akan dilihat dari remajanya saat ini. Dengan begitu kita berharap pemerintah mendukung dan memfasilitasi kegiatan-kegiatan remaja yang ada selama ini. Misalnya kegiatan Kepramukaan, Karang Taruna, Remaja Masjid, Remaja Gereja serta kegiatan-kegiatan remaja yang sifatnya keagamaan lainnya" kata pria yang akrab disebut pak Maman ini.

Dikatakan bahwa mendukung dan memfasilitasi kegiatan yang sudah ada dipandang relatif lebih

mudah bahkan lebih efektif, termasuk kegiatan olahraga, karena biasanya yang berkecimpung di bidang olahraga ini adalah kaum remaja.

"Jika pemerintah tidak mendorong kegiatan-kegiatan tersebut, yang kita khawatirkan kaum remaja akan mencari kegiatan-kegiatan sendiri yang menurut mereka nyaman diikuti bahkan mereka akan meluapkan keinginannya serta terjerumus ke hal-hal yang negatif, misalnya kumpulan kebut-kebutan, main sabu-sabu, minum minuman keras, berjudi dan lain-

lain. Karakter remaja itu mencari jatidiri, sehingga biasanya remaja akan bangga disebut orang yang pemberani serta disebut orang yang lain dari pada yang lain". tambahnya.

Pengawasan bersama

Pengawasan dari semua pihak terhadap kehidupan kaum remaja menjadi sangat penting, karena pemerintah hanya bisa memfasilitasi kegiatan-kegiatan tertentu saja, sedangkan pengawasan melekat tetap ada di masyarakat. Dengan begitu diharapkan masyarakat dapat memperhatikan lingkungannya masing-masing, khususnya terlebih terhadap kehidupan remaja.

Apalagi dengan perkembangan teknologi informasi dewasa ini yang semakin pesat, jika tidak ada kepedulian dari berbagai pihak terhadap kaum remaja, dimungkinkan mereka kaum remaja akan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi ini ke hal-hal yang negatif, seperti menjadi germo anak sekolah, membuka situs-situs porno dan lain-lain. Padahal sebenarnya perkembangan teknologi informasi ini tujuannya digunakan dalam hal-hal yang positif.

"Disini peran masyarakat dan orang tua menjadi sangat dominan. Kaum remaja yang hanya berkomunikasi dengan orang-orang seusianya harus didekati, dan orang tua tidak perlu kolot dalam membimbing remaja, karena pada waktu kaum remaja menginginkan curhat (menyampaikan keluhan kesahnya), dan curhatnya bukan ke orang tua tetapi ke teman sebayanya, maka jalan keluarnya akan berbahaya dan akan menjerumuskan remaja itu sendiri" pungkasnya(ss/lf)

# Pengawasan DPRD

## Perlu Dukungan Tenaga Profesional

Diketahui bahwa salah satu tugas pokok sekretariat DPRD adalah menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan administrasi keuangan, guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD. Hal ini sejalan dengan era global yang tingkat persaingan dalam kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sangatlah ketat. Maka maka anggota dan pegawai sekretariat DPRD terus menerus mengembangkan sumber dayanya.

Menurut Wakil Ketua DPRD Salatiga, Ir. H. Diah Sunarsasi, kemampuan sumber daya manusia di lingkungan DPRD, baik anggota maupun pegawai sekretariatnya perlu benar-benar memperhatikan kemampuannya secara kualitas.

Meskipun pegawai sekretariat adalah pegawai negeri sipil, namun sesuai tugasnya yang harus menyediakan serta mengkoordinasi tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD, maka mereka harus profesional. Sehingga mereka membutuhkan meningkatkan ilmu keterampilannya yang bisa melalui keikutsertaan dalam pelatihan-pelatihan, kursus maupun workshop.

Pembinaan Anggota DPRD serta para pegawainya sangat penting dan harus terus

dilakukan. Hal ini bertujuan untuk menciptakan perubahan prilaku dan pola pikir anggota DPRD dan pegawainya serta semua unsur yang ada, terutama yang menyangkut sumber daya manusianya. Dengan demikian diharapkan kinerja yang dicapai oleh segenap anggota DPRD dapat diukur keberhasilannya dari sebuah tujuan yang hendak dicapai.

### Penempatan pegawai di sekretariat

Bagi pegawai negeri sipil yang berada di lingkungan sekretariat DPRD harus benar-benar profesional. Pola kerja dan tingkah laku mereka tidak boleh dipengaruhi oleh kepentingan suatu golongan, karena kedudukan pegawai negeri sipil disini tetap sebagai unsur aparatur

Negara dan abdi masyarakat harus ikut andil dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan cara memfasilitasi kebutuhan anggota DPRD dalam mengemban tugasnya.

Maka dalam penempatan pegawai di lingkungan sekretariat DPRD, Badan Kepagawaian Daerah (BKD) Kota Salatiga perlu berkoordinasi dengan pimpinan DPRD sebagai pengguna pegawai tersebut.

“Tugas DPRD itu kan pengawasan, kalau kita tidak tahu apa yang harus kita awasi, karena tidak didukung oleh pegawai yang profesional, bagaimana kita akan mengawasi” kata Diah Sunarsasi.

Selain itu, menurutnya, di era keterbukaan sekarang ini sudah tidak saatnya untuk menyembunyikan hal-hal yang berhubungan dengan informasi publik. “saat ini kita masuk di era keterbukaan, sehingga tidak ada yang harus ditutup-tutupi, maka kita butuh pegawai sekretariat yang benar-benar profesional. Untuk jenjang karier bagi pegawai sekretariat pun juga harus mengakomodir masukan dari para pimpinan DPRD” tandasnya. (ss/lf).



*Ir. Hj. Diah Sunarsasi*

Foto: boedy's

## Komisi A DPRD Salatiga

### Standar Pelayanan Maksimal untuk Kesehatan



Foto: boedy's

**Ketua Komisi A, Dance Ishak Palit, M.Si**

Setelah diresmikannya pengangkatan Pimpinan DPRD Kota Salatiga masa bakti tahun 2014-2019 dengan keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/109 tahun 2014, untuk mendukung pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD, maka dibentuklah alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Diantara alat kelengkapan dewan tersebut adalah Komisi DPRD. Ini merupakan alat kelengkapan Dewan yang bersifat tetap. Adapun tugas Komisi adalah mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; melakukan pembahasan terhadap rancangan peraturan daerah, dan rancangan keputusan DPRD; melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan APBD sesuai dengan bidang komisi; membantu pimpinan DPRD untuk mengupayakan penyelesaian masalah yang

disampaikan oleh Walikota dan/atau masyarakat kepada DPRD.

Selain itu juga menerima, menampung dan membahas serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat; memperhatikan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah; melakukan kunjungan kerja komisi yang bersangkutan atas persetujuan Pimpinan DPRD; mengadakan rapat kerja dan dengar pendapat; mengajukan usul kepada Pimpinan DPRD yang termasuk dalam ruang lingkup bidang tugas masing-masing komisi; serta memberikan laporan tertulis kepada pimpinan DPRD tentang hasil pelaksanaan tugas komisi.

Dalam hal melakukan kunjungan kerja komisi, langkah pertama yang dilakukan komisi A usai dikukuhkan adalah melakukan kunjungan ke SD Sidorejo Lor 03. Kunjungan tersebut menghasilkan gagasan untuk penganggaran pengadaan bus sekolah yang bisa untuk mengantar siswa berlatih olahraga di lapangan maupun Stadion Kridanggo.

Ketua Komisi A DPRD Dance Ishak Palit mengatakan, anggota DPRD harus rutin turun ke masyarakat untuk menyerap aspirasi. Di antaranya mendatangi puskesmas sebagai pelayanan kesehatan.

Komisi A telah melakukan pembahasan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) mengenai BPJS dan layanan Bidang Kesehatan. "Puskesmas harus di BLUD (Badan Layanan Umum Daerah) kan, agar dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat tanpa mengutamakan pencarian keuntungan" kata pria yang akrab disapa Bung Dance. Selanjutnya dikatakan bahwa yang menjadi titik tekan dalam memberikan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat, Puskesmas harus benar-benar melakukan standar pelayanan Maksimal (SPM), bukan standar pelayanan minimal.

"Puskesmas jangan hanya menggunakan standar pelayanan minimal, tapi harus menggunakan standar pelayanan maksimal" tambahnya.

Puskesmas harus segera ditingkatkan statusnya sebagai BLUD. karena Puskesmas berbeda dengan SKPD pada umumnya. "Dengan begitu pola pengelolaan keuangannya dapat fleksibilitas yang berupa keleluasaan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, seperti halnya pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya" tandas Dance Ishak palit.

"Bila masyarakat sehat pembangunan akan berjalan dengan baik. Artinya bila warga sehat mereka bisa bekerja dan bisa memenuhi nafkah keluarga mereka dengan baik pula. Namun jika mereka sakit karena pelayanan kesehatan kita tidak maksimal maka hal ini juga akan berdampak pada proses pembangunan di masyarakat kita," ungkap Dance.

## SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMISI A DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA BIDANG HUKUM DAN PEMERINTAHAN

1. Ketua : Dance Ishak Palit, M.SI
2. Wakil Ketua : Drs.H. Bambang Riantoko
3. Sekretaris : dr. Suryaningsih. M.Kes
4. Anggota : Nono Rohana, S.Ag  
Ir. Hj, Adriana Susi Yudhawati, M.Pd  
Taufiq Eko Priyatno  
Sudiyono

### Keanggotaan Komisi A DPRD Kota Salatiga.

“Jangan sampai ada warga Salatiga yang mengeluh karena pelayanan kesehatan kita tidak maksimal. Kesehatan itu kebutuhan pokok, dengan kata lain hidup sehat adalah menjadi hak semua warga, maka pemerintah wajib menyediakan layanan kesehatan yang maksimal, bukan minimal. Kami berkomitmen untuk megawal proses ditingkatkannya status Puskesmas sebagai BLUD” ujar Dance.

### **Perencanaan yang matang**

Terpisah wakil ketua Komisi A, Drs. H. Bambang Riyantoko menjelaskan, dalam menyongsong datangnya tahun 2015, Pemkot harus dapat merealisasikan semua program kerja yang telah dibuat, termasuk program BPJS bagi warga miskin.

Bambang mengingatkan agar program yang disusun tidak sekedar bagus dan idealis saja, tapi harus bisa diselesaikan sesuai target. Target tersebut didalamnya target waktu dan target fisik ataupun selesainya suatu program kerja non fisik.

Menurut Bambang, pihak eksekutif jangan menyusun program muluk-muluk namun susah dikerjakan. Akan lebih baik jika program disesuaikan dengan kemampuan anggaran dan juga kemampuan sumber daya manusianya.

“Walikota atau eksekutif tentu lebih paham dan berpengalaman dalam menyusun program serta bagaimana strategi untuk menyelesaikannya. Mereka juga tentu paham betul tantangan dan kendala yang dihadapi ketika menjalankan suatu kegiatan. Pengalaman beberapa tahun terakhir saya harapkan jadi pelajaran dan jangan sampai terulang, seperti yang kita lihat beberapa pekerjaan atau proyek batal dilaksanakannya,” Bambang memberikan masukan.

Untuk dewan, tugas dan wewenangnya tidak sampai pada level tersebut, maka eksekutif yang dapat menyelesaikan semua yang telah direncanakan. Oleh karenanya 100 persen di lapangan yang memiliki wewenang adalah eksekutif. Dewan hanya



**Wakil Ketua Komisi A, Drs.H. Bambang Riantoko**

menjalankan fungsinya dalam peganggaran, pengawasan dan pembutan kebijakan atau undang-undang (perda).

“Saya tambahkan lagi bahwa semua program yang direncanakan adalah untuk kesejahteraan dan kemaslahatan warga Salatiga, oleh karenanya semua harus dirancang sebgasus mungkin dan dilaksanakan sebaik mungkin agar hasilnya bisa dinikmati masyarakat” kata Bambang Riantoko selaku wakil ketua Komisi A DPRD Salatiga..(lf/ss)

## Komisi B DPRD Salatiga

### Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Perlu Dipertajam



**Ketua Komisi, H. Budi Santoso, SE. MM**

**B**erdasarkan Rapat Paripurna Internal DPRD Kota Salatiga hari Rabu tertanggal 24 September 2014, telah disepakati dan ditetapkan pembentukan Alat Kelengkapan DPRD Kota Salatiga beserta dengan susunan keanggotaannya.

Maka Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga tentang Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga Tahun 2014-2019 pun terbentuk.

Adapun Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga tersebut, terdiri dari Badan Musyawarah; Komisi; Badan Anggaran; Badan Legislasi; dan Badan Kehormatan.

Sedangkan Komisi pada DPRD Kota Salatiga terdiri dari 3 Komisi. Yaitu Komisi A bidang Hukum dan Pemerintahan, Komisi B Bidang Ekonomi dan Keuangan serta Komisi C bidang Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat.

Komisi B yang menangani bidang ekonomi dan keuangan ini dipimpin oleh H. Budi Santoso, SE. MM sebagai ketua, M. Miftah wakil ketua dan B. Supriono, SE sebagai sekretaris. Adapun anggotanya adalah Bagas Aryanto, SP., Hj. Riawan Woro Endartiningrum, SE., Sri Setyo Pamilih Karni serta Mahmudah, SH.

Pada dasarnya kinerja Komisi B telah didasari oleh visi dan misi yang jelas, sehingga lebih terarah serta jelas capaiannya. Selain itu, diharapkan pengawasan ke depan lebih diarahkan pada sektor ekonomi, karena faktor ekonomi akan berimbas pada sektor keuangan juga.

Komisi B memiliki pandangan tentang pentingnya pemberdayaan ekonomi masyarakat. Maraknya minimarket misalnya, menjadi potensi masalah sosial yang serius bagi pasar tradisional serta UMKM di Kota Salatiga. Oleh karena itu pengawasan terhadap hal ini masuk dalam daftar fokus pogram Komisi B serta solusi antisipasinya. Karena hal ini akan menyangkut juga dengan urusan usaha kecil mikro dan koperasi.

Hal ini dimaksudkan guna mempertajam arah pemberdayaan ekonomi masyarakat ke ketahanan ekonomi keluarga. Sebagai unit sosial terkecil di masyarakat, keluarga harus dipandang sebagai subjek pembangunan. Artinya pemetaan masalah, langkah-langkah solusi harus tetap menguatkan peran dan fungsi keluarga. Dengan begitu seorang istri dan ibu dapat turut menguatkan ketahanan ekonomi keluarga tanpa harus mengabaikan fungsi dan peran utamanya sebagai ibu rumah tangga.

Di sektor keuangan, Komisi B melakukan pengawasan terhadap kinerja Pemerintah. Terutama yang berhubungan dengan manfaat, hasil dalam pelaksanaan program pembangunan, sehingga dapat dirasakan oleh masyarakat.

#### **Prihatin Menjamurnya Minimarket**

Menjamurnya sejumlah minimarket di Salatiga belakangan ini, mengundang keprihatinan Komisi B DPRD Kota Salatiga. Mereka mendesak Pemkot mengkaji kembali kebijakan berkenaan dengan ijin pendirian minimarket tersebut. Karena menurut DPRD dikhawatirkan akan mengancam kelangsungan pasar tradisional, terutama pasar tradisional yang keberadaannya di daerah pinggiran.

Terkait maraknya pembangunan minimarket di Kota Salatiga yang jaraknya berdekatan, DPRD Salatiga khususnya Komisi B menyadari bahwa hal ini diperlukan ada kajian khusus terkait pengaruh jarak pembangunan minimarket dengan pasar tradisional.

Ketua Komisi B bidang Hukum dan Pemerintahan DPRD Kota Salatiga, H. Budi Santoso,

**SUSUNAN KEANGGOTAAN  
KOMISI B  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA  
BIDANG EKONOMI DAN KEUANGAN**

1. Ketua : H. Budi Santoso, SE. MM
2. Wakil Ketua : M. Miftah
3. Sekretaris : B. Supriyono, SE
4. Anggota : Bagas Aryanto, SP  
Hj. Riawan Woro Endartiningrum, SE  
Sri Setyo Pamilih Karni  
Mahmudah, SH

**Keanggotaan Komisi B DPRD Kota Salatiga.**

SE. MM sangat menyoroti Perihal perizinan pendirian minimarket ini. Dalam waktu dekat, dirinya akan mengundang Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM (Disperindagkop dan UMKM) Kota Salatiga selaku dinas teknis yang menangani masalah pasar untuk mengkaji bersama. Budi Santoso berharap ada keseimbangan antara jumlah pasar modern dan pasar tradisional. Hal ini sesuai dengan tugas komisinya yang menangani masalah ekonomi dan keuangan.

Selain itu, Komisi B DPRD Salatiga juga tengah mencari solusi untuk pemberdayaan pasar-pasar tradisional yang ada saat ini. "Pasar tradisional harus berbenah agar dapat bersaing dengan pasar modern. Harapannya, pasar tradisional menjadi magnet bagi masyarakat," kata Budi Santoso selaku Ketua Komisi B yang menangani bidang Ekonomi dan Keuangan ini.

Terkait jumlah minimarket yang terus bertambah, menurut Wakil Ketua Komisi bidang Ekonomi keuangan M. Miftah memandang perlu adanya kajian mengenai keberadaan minimarket saat ini. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPPT dan PM) Kota Salatiga, terkait pemberian izin pendirian minimarket harus berkoordinasi dengan dinas teknis dalam hal ini Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM (Disperindagkop dan UMKM) Kota Salatiga. Karena terkait perizinan ini, pihak BPPT dan PM hanya menerima rekomendasi dari masing-masing dinas teknis dalam hal memberikan perizinan pendirian minimarket ini.

Menurutnya, pasar-pasar tradisional sangat penting bagi masyarakat kecil mengingat di sana menjadi tempat berbagai hasil produksi rakyat dipasarkan. Namun saat ini sebagian besar pasar tradisional kondisinya sangat memprihatinkan. Selain kumuh, lantai beberapa pasar berubah menjadi



Foto: boedy's

**Wakil Ketua Komisi, M. Miftah**

kubangan saat hujan turun karena buruknya drainase. "Belum lagi soal sampah dan parkir yang semrawut," imbuh M. Miftah. (lf/ss)

## Komisi C DPRD Salatiga

### Mendukung Penuh Kegiatan Pengawasan



**Ketua Komisi, H. Kemat, S.Sos**

**T**ugas dan Wewenang Pengawasan yang dimiliki oleh DPRD Kota Salatiga, merupakan kewenangan diberikan oleh Undang-Undang dalam mendukung kinerja DPRD dalam mengawasi Kinerja Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Pembangunan.

Fungsi ini penting dan perlu, karena dengan fungsi tersebut DPRD dapat mengawasi kinerja Pemerintah daerah dalam melaksanakan kebijakan program pembangunan daerah. Terkait dengan tugas dan wewenang DPRD dalam melakukan pengawasan kinerja Pembangunan daerah, menurut Ketua Komisi C DPRD Kota Salatiga, H. Kemat, S.Sos mengatakan fungsi kontrolling atau pengawasan yang dilakukan oleh DPRD merupakan fungsi yang paling penting dalam tugas dan wewenang DPRD, karena segala sesuatu tanpa adanya kontrol tentu akan mengakibatkan mutu pekerjaan atau apa saja yang

merupakan bentuk kegiatan akan tidak memiliki kualitas, terutama pada infrastruktur, maka fungsi kontrol ini ditekankan sebagai upaya dalam mengawasi kinerja-kinerja partnershipnya yaitu birokrasi.

Mengenai langkah-langkah yang dikedepankan oleh Komisi C dalam mendukung kegiatan Pengawasan DPRD, menurut H. Kemat, DPRD menggunakan fasilitas yang ada yaitu kunjungan lokal, rapat-rapat dengar pendapat dengan SKPD terkait dan dilaksanakan hampir rutin setiap bulan. Selanjutnya ditunjang dengan masukan-masukan yang berkenaan dengan pelaporan di tingkat bawah berkenaan dengan mutu pembangunan yang dilaksanakan oleh pemangku kepentingan yaitu eksekutif.

Kontrol yang dilakukan oleh komisi C, bukan mencari kesalahan tapi pengawasan ini dilakukan untuk menyeimbangkan bahwa kontrol digunakan semata-mata untuk kepentingan masyarakat.

Adapun bentuk pengawasan yang dilakukan oleh komisi C, pertama, adalah turun ke lapangan yaitu ada dua hal : pertama adalah rutinitas dalam rangka menterjemahkan kewajiban lokal. kedua, manakala ada aspirasi dari masyarakat ketika di daerah atau lokasi kegiatan terdapat ketidakpuasan masyarakat. “Kedua hal tersebut kita jadikan sebagai alat ukur pihaknya melakukan kontrol lapangan” kata H. Kemat, S.Sos selaku Ketua Komisi.

#### **Anggota Komisi Dukung Pengawasan**

Upaya komisi C dalam menggerakkan anggota komisi untuk mendukung kegiatan Pengawasan DPRD, menurut H. Kemat, komisi C merupakan tulang punggung pendapatan terutama dibidang aset daerah yaitu dibidang PAD, maka komisi C dituntut untuk bekerja sesuai dengan tupoksi agar dapat bekerja secara tepat guna, efektif dan tepat waktu.

Mengenai hasil pengawasan Komisi C akan membawa hasil pengawasan atau pemeriksaan kepada pimpinan, sehingga pimpinan dapat menindaklanjuti dengan rapat khusus dengar pendapat dengan beberapa SKPD. Kemudian memberikan evaluasi terhadap kinerja mereka pada rapat forum tertentu sehingga apabila itu dilaksanakan sangat mungkin akan terjadi perubahan pola sikap, pola pikir dan pola tata kelola mereka terhadap kebijakan dan tanggung jawab mereka sebagai pelaksana pemangku kepentingan.

Untuk memantau hasil pengawasan DPRD terhadap kinerja Pembangunan daerah, selama ini, Komisi C sudah merasa memantau dengan maksimal dan sudah dirasakan betul adanya semacam sinergitas yang terjalin untuk proses pengawasan serta

**SUSUNAN KEANGGOTAAN  
KOMISI C  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA  
BIDANG PEMBANGUNAN  
DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**

- |                |  |
|----------------|--|
| 1. Ketua       | : H. Kemat, S.Sos  |
| 2. Wakil Ketua | : Eni Tri Yuliasuti  |
| 3. Sekretaris  | : Agus Joko Setiawan   |
| 4. Anggota     | : Latif Nahari, ST<br>H. Suniprat<br>Drs. Sarmin<br>KH. Muh. Syafi'i<br>Supriyadi Fatkhi |

**Keanggotaan Komisi C DPRD Kota Salatiga.**

**Fungsi Utama Lembaga DPRD**

Menyinggung fungsi utama lembaga DPRD, menurut Wakil Ketua Komisi C DPRD Salatiga Eny Tri Yuliasuti adalah pengawasan. Diungkapkan bahwa anggota Komisi C dihuni oleh pengurus-pengurus partai dan tokoh masyarakat sehingga ini menjadi modal kuat dalam melaksanakan pengawasan terhadap kinerja pemerintah.

Namun menurutnya DPRD tetap harus berupaya dalam meningkatkan porsi pengawasannya, sehingga komitmen terhadap pembangunan untuk melaksanakan proses mensejahterakan masyarakat di Kota Salatiga akan tercapai.

Eny Tri berharap untuk menekankan pengawasan ini bukan untuk membidik kesalahan, tapi sebuah kontrol. Sehingga tidak semena-mena dalam melaksanakan justifikasi benar atau salah tetapi semata-mata mengingatkan barangkali terjadi sesuatu yang tidak diinginkan secara dini, "ini merupakan bagian dari salah satu tujuan kontrol anggota DPRD kepada partnership dalam hal ini birokrasi" tutur praktisi partai Golkar ini.

Menurutnya keberhasilan lembaga DPRD salah satunya tercermin dalam fungsinya dalam mengawasi jalannya pemerintahan. Sesuai fungsinya sebagai lembaga pengawasan yang kedudukannya sederajat dengan Pemerintah Daerah, DPRD juga diberi hak melakukan penolakan terhadap rancangan perda yang diajukan Pemerintah apabila perlu.

Bahkan DPRD juga diberi hak untuk mengambil inisiatif sendiri guna merancang dan mengajukan rancangan sendiri kepada Pemerintah. Dengan begitu sudah seharusnya semua anggota DPRD untuk meningkatkan perannya sebagai wakil rakyat yang secara aktif mengawasi jalannya pemerintahan daerah dengan sebaik-baiknya".(ss/lf)



Foto: boedy's

**Wakil Ketua Komisi, Eny Tri Yuliasuti**

penganggaran. Komisi C telah melakukan pengawasan berdasarkan payung hukum sebagai batasan mereka melakukan kegiatan.

## Badan Anggaran DPRD

### Mengkonfirmasi Rencana Kegiatan Lewat Musrenbang



**B. Supriyono, SE**

Pembahasan anggaran 2015 telah dilaksanakan pemerintah Kota Salatiga. Semua pihak yang terlibat masing-masing menyiapkan materi Pembahasannya termasuk Badan Anggaran DPRD Kota Salatiga.

DPRD Kota Salatiga melalui Badan Anggarannya sudah siap dalam hal fungsi dan tugasnya sebagai kontrol pemerintah dalam hal anggaran. Tugas Pokok Badan Anggaran DPRD Kota Salatiga ini layak di ketahui oleh masyarakat luas.

Menurut keputusan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga nomor

170/13/IX/2014 tentang alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga tahun 2014 – 2019, salah satu tugas Badan Anggaran (Banggar) DPRD adalah memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD kepada kepala daerah dalam mempersiapkan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah paling lambat 5 (lima) bulan sebelum ditetapkan APBD.

Menurut B. Supriyono, SE selaku anggota badan anggaran, anggota badan anggaran selalu melakukan konsultasi kepada komisi guna memperoleh masukan dalam rangka pembahasan rancangan KUA serta PPAS. Selain itu Banggar juga memberikan saran dan pendapat kepada kepala daerah, dalam hal ini Walikota Salatiga dalam hal mempersiapkan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD dan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Salatiga.

Menurut politisi PDI Perjuangan dari Kecamatan Sidorejo ini, dalam melakukan fungsi kontrol DPRD, banggar juga melakukan penyempurnaan rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berdasarkan hasil evaluasi Menteri Dalam Negeri bersama tim anggaran Pemerintah Daerah Kota Salatiga.

Bernardus Supriyono, SE merasa senang bila masyarakat mengetahui akan hal ini. Menurutnya, adanya komunikasi antara DPRD dengan rakyat selama ini perlu terus dilakukan, terutama di daerah pemilihan masing-masing. “Dalam pertemuan-pertemuan seperti itu, rakyat dapat menyampaikan aspirasinya, sementara kewajiban DPRD untuk menyerap dan memperjuangkan”. katanya.

Dikatakan, dalam berbagai kunjungan DPRD akan mendapati banyak hal tentang pelayanan kepada masyarakat yang belum dikerjakan secara optimal. Misalnya, keluhan terhadap Rumah Sakit, Pendidikan, Pasar dan Perijinan.

#### Musrenbang

Ketika substansi “pokok-pokok pikiran DPRD” berbeda dengan isi KUA dan PPAS, yang nota bene bersumber dari Peraturan Kepala Daerah (Perkada) tentang RKPD, maka ada peluang bagi anggota dewan untuk memasukkan usulan program/kegiatan yang tidak bersumber dari Musrenbang namun diutamakan dengan skala prioritas.

Menurut H. Suniprat, wakil rakyat dari PDIP, Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan) dilakukan atas dasar kebutuhan, sehingga harus bersifat transparan dan akuntabel sejak perencanaannya.

## SUSUNAN KEANGGOTAAN BADAN ANGGARAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA

1. KETUA : M. TEDDY SULISTIO, SE
2. WAKIL KETUA : M. FATHUR RAHMAN, SE, MM
3. WAKIL KETUA : Ir. Hj. DIAH SUNARSASI
4. ANGGOTA : DANCE ISHAK PALIT, M.Si  
H. BUDI SANTOSO, SE, MM  
H. KEMAT, S.Sos  
SUDIYONO  
H. SUNIPRAT  
B. SUPRIYONO, SE  
LATIF NAHARI, ST  
AGUS JOKO SETIAWAN  
dr. SURYANINGSIH, M.Kes  
M. MIFTAH

### Keanggotaan Badan Anggaran DPRD Kota Salatiga.

Musrenbang yang rutin digelar tiap tahun, dan biasa dijadwalkan awal Februari oleh Bappeda ini perlu dimanfaatkan oleh masyarakat. Karena dengan musrenbang dapat menampung dan menetapkan kegiatan prioritas sesuai kebutuhan masyarakat, dan menetapkan kegiatan yang dibiayai APBD atau sumber pendanaan lainnya.

“Dalam semua tahapan ini diharapkan ada partisipasi masyarakat untuk merencanakan sesuatu dan berakhir pada pengambilan kesepakatan” kata wakil rakyat dari PDI Perjuangan H. Suniprat.

Diketahui bahwa sebelum kegiatan musrenbang, kelurahan telah menyelenggarakan forum serupa, yang hasilnya dibahas di tingkat Kecamatan. “Forum musyawarah secara partisipatif semacam ini sangat penting untuk menyepakati rencana kegiatan tahun anggaran berjalan, sesuai dengan tingkatannya” tambahnya.

Musrenbang pada prinsipnya merupakan mekanisme untuk “mengkonfirmasi” rencana program/kegiatan yang akan dilaksanakan oleh SKPD (sesuai dengan Tupoksinya) dengan yang diusulkan masyarakat (konstituen).

Hasil dari Musrenbang yang menurut Bappeda “layak” (sesuai dengan kewenangan dan fungsi pemerintahan) akan dicantumkan dalam RKPD dalam bentuk nama program dan kegiatan serta SKPD yang akan melaksanakan, dilengkapi dengan target kinerja yang ingin dicapai, jumlah dana yang dibutuhkan untuk melaksanakannya, dan sumber pendanaannya (kabupaten/kota, provinsi, atau pusat). (ss/lf)



**H. Suniprat**

## Badan Legislasi DPRD

### Hasil Pembangunan harus Bisa Dinikmati Masyarakat

Sejalan dengan perubahan konstitusi dan kematangan otonomi daerah, mulai dilakukan penguatan fungsi dan kinerja dewan melalui perubahan regulasi. Adanya struktur kelembagaan Badan Legislasi Daerah dapat menguatkan penganggaran, peningkatan daya dukung dewan dan penentuan Program Legislasi Daerah sebagai instrumen perencanaan pembentukan Peraturan Daerah yang disusun secara berencana, terpadu dan sistematis antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pemerintah Daerah.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, baik DPRD Provinsi maupun Kabupaten/Kota, sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah memiliki peran yang strategis. DPRD dalam melaksanakan fungsi Legislasi dibantu oleh sebuah alat kelengkapan DPRD yang disebut dengan Badan Legislasi Daerah atau biasa disebut Balegda

Kehadiran Balegda sangat diperlukan, agar kinerja dewan dalam menjalankan fungsi Legislasi, anggaran dan pengawasan lebih optimal. Kebutuhan akan alat kelengkapan Balegda di DPRD merupakan potensi dan peluang yang dapat digali dan dimanfaatkan.

Disini Balegda menjalankan fungsi Legislasi dalam membentuk suatu perda yang demokratis, DPRD melalui Badan Legislasi Daerah melaksanakan proses pembentukan Ranperda dengan dua cara, yaitu Ranperda yang disampaikan Walikota/Bupati melalui bagian hukum kepada pimpinan DPRD dengan memberikan penjelasan, keterangan dan naskah akademik dan selanjutnya didaftarkan dalam Program Legislasi Daerah (Prolegda) setelah sebelumnya mendapat pertimbangan dari Balegda DPRD.

Ketua Badan Legislasi, Supriyadi Fatkhi, mengatakan bahwa dalam rangka melaksanakan tugas-tugas Badan Legislasi DPRD, telah disampaikan beberapa kegiatan yang perlu segera dilaksanakan mengingat urgensi terhadap penyelesaiannya ditengah padatnya jadwal kegiatan DPRD menjelang akhir tahun anggaran 2014 ini.

“Kami telah menyampaikan beberapa kegiatan menjelang akhir 2014 ini, kegiatan-kegiatan ini sangat urgen, meskipun jadwal kegiatan kita sangat padat, namun hal ini perlu diprioritaskan” tandasnya.

Adapun kegiatan tersebut adalah penetapan Program Legislasi Daerah (Prolegda) Kota Salatiga Tahun 2015. Prolegda ini merupakan program yang



Foto: boedy's

**Ketua Badan Legislasi, Supriyadi Fatkhi**

memuat daftar urutan Rancangan Peraturan Daerah yang merupakan kebutuhan Daerah beserta alasannya yang disusun berdasarkan skala prioritas. Prolegda yang terdiri dari Raperda atas inisiatif DPRD dan Raperda atas inisiatif Pemerintah Daerah ini ditetapkan oleh Pimpinan DPRD sebelum akhir tahun anggaran dan diajukan rencana kebutuhan anggarannya pada saat menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

Finalisasi Pembahasan terhadap 6 (enam) Raperda atas inisiatif DPRD yang masuk dalam Prolegda Tahun 2014. Berdasarkan dokumen kegiatan yang ada pada Badan Legislasi DPRD, saat ini telah berhasil disusun 6 (enam) Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang merupakan inisiatif DPRD Tahun 2014, dimana dalam pelaksanaannya telah difasilitasi oleh Sekretaris DPRD Kota Salatiga dengan menyediakan Tenaga Pakar Akademisi LP2M Universitas Negeri Semarang yang meliputi Raperda tentang Penyelenggaraan Olah Raga; Raperda tentang

## SUSUNAN KEANGGOTAAN BADAN LEGISLASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA

NO.	NAMA	KEDUDUKAN DALAM BADAN LEGISLASI
1.	SUPRIYADI FATKHI	KETUA
2.	SRI SETYO PAMILIH KARNI	WAKIL KETUA
3.	LATIF NAHARI, ST	ANGGOTA
4.	B. SUPRIYONO, SE	ANGGOTA
5.	Ir. Hj. ANDRIANA SUSI YUDHAWATI	ANGGOTA
6.	ENI TRI YULIASTUTI	ANGGOTA
7.	KH. MUH. SYAFI'I	ANGGOTA



Foto: boedy's

### Wakil Ketua Badan Legislasi, Sri Setyo Pamilih Karni

Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia; Raperda tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi; Raperda tentang Pengelolaan Dana Bergulir; Raperda tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup; serta Raperda tentang Partisipasi dan Transparansi Publik.

### Keanggotaan Badan Legislasi DPRD Kota Salatiga.

Disinggung masalah proses penetapan raperda tersebut, wakil Ketua Badan Legislasi, Sri Setyo Pamilih Karni mengatakan bahwa Raperda tersebut, dalam proses penetapannya harus disampaikan kepada Walikota.

“Sebelumnya perlu terlebih dahulu dilaksanakan finalisasi pembahasan terhadap seluruh substansi pengaturan dari setiap materi Raperda tersebut, serta dalam rangka memenuhi syarat formil legalitas dalam penyusunannya perlu terlebih dahulu dilaksanakan Public Hearing (Dengar Pendapat Publik) terhadap 6 (enam) Raperda tersebut” kata Sri Setyo Pamilih Karni.

Berdasarkan Surat Walikota Nomor 170/097/011.2 tertanggal 3 Maret 2014 Perihal Penyampaian Raperda atas Usul Walikota Tahun 2013 dan Prolegda Tahun 2014. Raperda yang disampaikan tersebut terdiri dari: Raperda tentang Penyelenggaraan Usaha Pariwisata; Raperda tentang Pengelolaan dan Pelestarian Cagar Budaya Daerah; Raperda tentang Penataan dan Pembinaan Toko Modern; Raperda tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Khaki Lima; serta Raperda tentang Pengelola Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

“Terhadap ke 5 (lima) Raperda yang disampaikan Walikota dimana kelimanya masuk dalam Prolegda tahun 2013 tersebut, dalam proses penetapannya perlu untuk segera dilakukan pembahasan. Hal ini sehubungan dengan keberlakuan terhadap 5 (lima) Raperda tersebut tengah dinanti oleh masyarakat kota Salatiga, Dengan demikian bisa segera dipergunakan sebagai pedoman dan landasan atas permasalahan yang terjadi di Daerah” tambah Wakil Ketua Badan Legislasi, Sri Setyo Pamilih Karni ini. **(lf/ss)**

## Badan Kehormatan DPRD

### Penegak Aturan dan Tata Tertib Dewan

**B**adan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat adalah salah satu Alat Kelengkapan DPR, dimana alat kelengkapan ini berhubungan dengan masalah kehormatan para wakil rakyat, baik di DPR pusat maupun di DPR di Daerah.

Dalam keberadaannya, alat kelengkapan ini guna menjawab kebutuhan dari adanya arus reformasi yang menuntut adanya perubahan. Keberadaan alat kelengkapan ini sangat penting dan strategis dalam melaksanakan fungsi dan tugas dewan guna mewujudkan Pemerintahan yang bersih (*good and clean governance*).

Tugas dan wewenang Badan Kehormatan dalam menjaga martabat dan kehormatan Anggota DPR merupakan hal yang sangat penting. Terlebih lagi adanya upaya Badan Kehormatan sebagai salah satu alat kelengkapan DPR dalam penyelesaian pelanggaran kode etik Anggotanya.

Perlu diketahui bahwa Badan Kehormatan yang dibentuk oleh DPRD ini merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap.

Menurut Ketua Badan Kehormatan DPRD Salatiga Nono Rohana, S.Ag, pembentukan Badan Kehormatan ditetapkan dengan keputusan DPRD, sedangkan anggota Badan Kehormatan dipilih dari dan oleh anggota DPRD.

“Untuk DPRD Kabupaten/Kota yang beranggotakan sampai dengan 34 orang berjumlah tiga orang, dan untuk DPRD Kabupaten/Kota yang beranggotakan 35 – 50 orang berjumlah lima orang” kata Nono Rohana.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa Pimpinan Badan Kehormatan terdiri atas satu orang ketua dan satu orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Badan Kehormatan, sedangkan anggota Badan Kehormatan dipilih dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD berdasarkan usul dari masing-masing fraksi.

Untuk memilih anggota Badan Kehormatan, masing masing fraksi berhak mengusulkan satu orang calon anggota Badan Kehormatan. Dalam hal di DPRD hanya terdapat dua fraksi, maka fraksi yang memiliki jumlah kursi lebih banyak berhak mengusulkan dua orang calon anggota Badan Kehormatan.

Untuk Masa tugas anggota Badan Kehormatan paling lama 2½ (dua setengah) tahun. Anggota DPRD



Foto: boedy's

#### **Ketua Badan Kehormatan, Nono Rohana, S.Ag**

pengganti antarwaktu menduduki tempat anggota Badan Kehormatan yang digantikan.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Badan Kehormatan DPRD dibantu oleh sekretariat badan kehormatan yang secara fungsional dilaksanakan oleh sekretariat DPRD. Hal ini sesuai dengan Pasal 56 PP16/2010.

#### **Tugas Badan Kehormatan**

Ketua Badan Kehormatan DPRD Kota Salatiga Nono Rohana, S.Ag. mengatakan bahwa dalam melaksanakan kontrol terhadap kinerja DPRD bukan hanya pengawasan terhadap anggota DPRD dari orang per orang, melainkan juga pengawasan terhadap institusinya.

Nono Rohana menyebut, jika seandainya ada anggota DPRD yang melanggar kode etik dewan, perlu adanya tindakan nyata berupa sanksi. “Ini adalah tugas Badan Kehormatan” katanya singkat.

## SUSUNAN KEANGGOTAAN BADAN KEHORMATAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA

NO.	NAMA	KEDUDUKAN DALAM BADAN KEHORMATAN
1.	NONO ROHANA, S.Ag	KETUA
2.	MAHMUDAH, SH	WAKIL KETUA
3.	H. SUNIPRAT	ANGGOTA



Foto: boedy's

### **Mahmudah, SH**

“Eksekusi terhadap sanksi bagi Anggota DPRD yang melanggar aturan tetap harus dilaksanakan sesuai aturan yang ada” tambahnya.

Menurutnya, mentaati kode etik Dewan serta memapuhi tata tertib yang ada merupakan bentuk pertanggungjawaban anggota DPRD kepada rakyat.

“Rakyat akan menilai apakah wakilnya benar-benar mewakili atau hanya memikirkan kepentingan pribadi. Hal ini bisa dilihat dengan adanya kepatuhan anggota terhadap aturan yang ada” tandasnya.

### **Keanggotaan Badan Kehormatan DPRD Kota Salatiga.**

Jika fungsi Badan Kehormatan dapat dilaksanakan dengan baik, maka fungsi kedewanan berkaitan dengan legislasi, penganggaran, dan pengawasanpun dapat dipantau dengan baik pula. “Badan Kehormatan perlu memantau dan mengevaluasi disiplin tiap Anggota DPRD serta kepatuhannya terhadap moral, kode etik, serta peraturan tata tertib DPRD dalam rangka menjaga martabat, kehormatan, citra juga kredibilitas DPRD” tutup PKS ini.

### **Eksekusi terhadap Sangsi**

Pelaksanaan fungsi Badan Kehormatan dalam menegakkan Peraturan Tata tertib kaitannya dengan Kode Etik anggota DPRD sangat dibutuhkan.

Menurut Wakil Rakyat dari Partai Persatuan pembangunan, Mahmudah, SH. Badan Kehormatan mempunyai hak atau kewenangan untuk meneliti dan memeriksa setiap anggota DPRD yang melakukan pelanggaran kode etik.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa dari hasil penelitan dan pemeriksaan pelanggaran tersebut akan disampaikan kepada Pimpinan DPRD.

“Badan Kehormatan juga berhak menyampaikan pertimbangan hasil pemeriksaannya serta merekomendasikan sanksi atau rehabilitasi terhadap anggota DPRD yang melanggar kode etik” kata Mahmudah.

Dengan mendasarkannya pada Peraturan Tata Tertib dan Peraturan Kode Etik Dewan Perwakilan tersebut. Jika ada kasus pelanggaran, Badan Kehormatan mempunyai fungsi, kewenangan dan tugas untuk meneliti dan memeriksa pelanggaran, yang selanjutnya akan menyampaikan pertimbangan hasil pemeriksaan sampai merekomendasikan sanksi atau rehabilitasi terhadap anggota DPRD yang dilaporkan.

“Meskipun demikian, eksekusi terhadap sanksi bagi anggota DPRD yang melanggar aturan tetap ada pada Pimpinan DPRD” tandasnya. **(ss/l)**



## Drumblek Kesenian Asli Salatiga “dari Salatiga untuk Indonesia”

Oleh: Budi Susilo, S.Sos \*)

**K**elompok atau komunitas drumblek dari Salatiga sering kali menghiasi karnaval atau festival dalam rangkaian kegiatan yang diselenggarakan di Kota Salatiga. Para peserta biasanya mengelilingi jalan-jalan protokol yang ada di kota kecil di lereng timur Gunung Merbabu ini. Biasanya, kegiatan semacam itu juga diadakan panggung kehormatan yang berfungsi untuk memberikan waktu kepada para peserta karnaval ataupun festival untuk menunjukkan kebolehannya dalam hal menabuh alat musiknya.

Di kota kecil yang hanya memiliki empat kecamatan ini, para penonton drumblek biasanya sangat antusias. Hampir setiap jalan yang dilalui peserta drumblek dipadati pengunjung. Terlebih lagi di depan panggung kehormatan. Dikarenakan banyaknya penonton, biasanya para kontestan agak kesulitan untuk unjuk kebolehan dalam hal memainkan alat musiknya.

Itulah kesenian asli Salatiga, kesenian yang lahir dari Salatiga. Memang Drumblek merupakan kesenian asli Kota Salatiga yang dipersembahkan untuk Negara tercinta “Indonesia”. Drumblek yang cara memainkannya seperti drum band ataupun marching band ini biasanya dimainkan oleh sekelompok pemusik dengan jumlah cukup banyak. Adapun yang membedakan antara drumblek dengan drum band ataupun marching band adalah peralatannya.

Peralatan musik drumblek menggunakan kaleng, tong plastik bekas, drum kaleng bekas, dan bambu. Para penabuhnya menggunakan atribut khas sambil memainkan musik dengan media tong plastik bekas, drum kaleng bekas, serta bambu tersebut. Mereka memainkan musik secara berkelompok dengan berbaris layaknya sebuah kelompok marching band ataupun drum band.

Selain itu, drumblek juga dipimpin oleh beberapa mayoret, layaknya drum band ataupun marching band. Kini Drumblek benar-benar menjadi ikon Kota Salatiga. Oleh karenanya, diharapkan masyarakat luar Salatiga juga mengetahui bahwa drumblek adalah musik asli Salatiga. Drumblek adalah kesenian asli dari Kota Salatiga yang khusus dipersembahkan untuk Indonesia tercinta.



### Kesenian yang baru berkembang

Meskipun Drumblek merupakan kesenian musik yang baru berkembang, Namun peningkatannya sangat pesat. Hal ini dapat dilihat dengan semakin bermunculannya kelompok-kelompok para penabuh tong maupun blek ini.

Hampir di setiap kelurahan di Kota Salatiga berdiri kelompok drumblek. Adapun beberapa kelompok yang sudah dikenal antara lain Pancuran, Pungkursari, Banjaran, MTS Yasita, Turusan (Laskar Patimura) serta Bung Teddy Drumblack Club.

Di Kota Salatiga drumblek sering dijumpai di beberapa acara baik yang diselenggarakan oleh komunitas ataupun instansi dan bahkan ada yang secara pribadi. Selain itu, juga sering diselenggarakan acara yang khusus untuk drumblek itu sendiri.



Ketua DPRD Kota Salatiga pun pernah menyelenggarakan Festival yang acaranya memang digelar khusus untuk drumblek dengan berbagai hadiah menarik. Dalam festival-festival yang ada di Salatiga memang sengaja menonjolkan drumblek ke masyarakat karena memang merupakan kesenian khas Kota Salatiga. Saat itu ada sebanyak 19 kelompok drumblek dari Salatiga mengikuti festival.

Wahana wisata Dream Land Salatiga juga sudah pernah menyelenggarakan festival serupa dan wahana wisata tersebut sekaligus sebagai lokasi acara festival.

Fenomena drumblek yang saat ini sudah digandrungi warga Salatiga ini memang sangat perlu dikaji lebih dalam dan dilestarikan keberadaannya, sehingga bukan lagi sebagai kesenian penghibur, melainkan juga agar kesenian asli Salatiga yang satu ini kedepan tidak hanya sebagai kesenian masa lalu yang akan hilang ditelan waktu.

#### **Ulang Tahun Emas**

Pada 1995, drumblek Salatiga pernah mendapat kesempatan tampil dalam acara ulang tahun emas Indonesia di Jakarta. Pada saat itu, personel drumblek bukan hanya masyarakat kelompok kecil, tetapi gabungan dari beberapa daerah seperti Pancuran, Pungkursari, Ngenthak dan Margosari.

Awal pembentukan drumblek hanya mempunyai lebih kurang 50 orang. Pada saat bermain di Jakarta, sudah bisa menyaring 600 orang.

Alat musik yang digunakan saat itu adalah tong sampah aluminium sebagai pengganti snar drum, tong plastik besar sebagai bass dram, dan belira sebagai pengganti melodi. Pada awalnya instrumen melodi belum menggunakan belira tetapi menggunakan wilah atau gamelan Jawa. Inilah yang menjadi kekhasan

musik ini pada waktu itu. Kini ditambahkan pula instrumen dari bambu yang menyerupai kentongan pada zaman dulu. Aransemen yang dimainkan bersifat bebas tidak ada aturan baku. Tetapi dilihat dari sisi gaya dalam memainkan lagu hampir mirip drum band atau marching band.

#### **Perkenalkan drumblek**

Untuk mengenalkan musik drumblek yang merupakan kesenian asli Salatiga kepada masyarakat, warga Salatiga memiliki cara unik, yaitu dengan pawai drumblek sambil keliling kota. Para seniman dan aktivis Kampus Universitas Kristen Satya Wacana pernah mengajak ratusan mahasiswa barunya untuk berlatih dan memainkan kesenian drumblek berkeliling kota dalam rangka kegiatan orientasi mahasiswa baru.

Selain itu dalam karnaval HUT Kemerdekaan RI, drumblek yang merupakan kesenian khas Salatiga ini selalu turut ambil bagian sebagai peserta. Biasanya acara semacam ini dilihat ribuan warga Salatiga. Mereka “tumplek blek” di sepanjang jalan yang dilewati peserta. Masyarakat Salatiga mengaku senang dengan digelarnya karnaval-karnaval tersebut.

Diharapkan, kesenian drumblek yang sudah menjadi ikon Salatiga ini, dapat dilihat oleh masyarakat luar dan akhirnya masyarakat luar tahu bahwa kesenian ini adalah kesenian asli Salatiga. Dengan begitu drumblek sebagai ikon Salatiga semakin dikenal dan dapat dilestarikan keberadaannya.

***”Penulis adalah Ka. Sub Bagian Humas  
pada Sekretariat DPRD  
Kota Salatiga***

# Laksanana Muda TNI Yosaphat Sudarso

Dirangkum oleh: Sri Setyawati \*)



**Y**osaphat Sudarso, yang dikenal dengan sebutan Yos Sudarso, lahir di Salatiga, Jawa Tengah pada tanggal 24 November 1925. Yos Sudarso lahir dari pasangan Sukarno Darmoprawiro (polisi) dan Mariyam. Yos berperawakan kecil, cerdas, pembawaannya tenang, dan santun. Saat anak-anak, Yos bersekolah di HIS (Hollandsch Inlandsch School), setingkat SD, di Salatiga. Setelah tamat dari HIS pada tahun 1940, orang tuanya menginginkan Yos menjadi guru, tapi ia malah masuk MULO (Meer Uitgebreid Lager Onderwijs) di Semarang. Baru 5 bulan di situ, Jepang datang. Yos pun kembali ke Salatiga, kemudian masuk SMP Negeri di sana. Dia berhasil menamatkan pendidikan SMP pada tahun 1943. Setelah lulus SMP, Yos masuk ke Sekolah Guru di Muntilan, namun sekolah ini tidak dapat ditamatkannya karena pada masa itu terjadi peralihan pendudukan dari Belanda ke Jepang. Pada zaman pendudukan Jepang, Yos melanjutkan pendidikannya ke Sekolah Tinggi Pelayaran di Semarang selama setahun dan mengikuti pendidikan opsir di Goo Osamu Butai. Di sana, Yos termasuk salah satu lulusan terbaik. Oleh karena itu, pada tahun 1944, ia dipekerjakan sebagai mualim di Kapal Goo Osamu Butai.

Setelah Proklamasi Kemerdekaan, Yos Sudarso bergabung dengan BKR Laut, yang selanjutnya dinamakan Angkatan Laut Republik Indonesia (ALRI). Pada waktu itu, Angkatan Laut belum memiliki armada. Kapal-kapal yang ada sangat sedikit, beberapa di antara yang ada adalah kapal-kapal kayu peninggalan Jepang. Selama di BKR Laut, Yos Sudarso sering ikut dalam operasi-operasi militer untuk m e m a d a m k a n pemberontakan di daerah. Yos juga turut dalam Operasi Lintas Laut hingga ke Kepulauan Maluku.

Sesudah pengakuan kedaulatan RI, Yos diangkat menjadi komandan kapal, mula-mula di KRI Alu, KRI Gajah Mada, kemudian KRI Rajawali, dan akhirnya KRI Pattimura. Pada tahun 1958, Yos pernah menjabat sebagai

hakim pengadilan tentara walau hanya sekitar 4 bulan.

Setahun berikutnya, 1959, terjadilah pergolakan di dalam tubuh Angkatan Laut. Masalahnya, sebagian anggota tidak menyetujui kebijaksanaan yang diambil oleh pimpinan Angkatan Laut. Bersama Letnan Kolonel Ali Sadikin, Yos Sudarso menuntut supaya Kepala Staf Angkatan Laut, Laksamana Subiyakto, diganti. Pemerintah pun mempertimbangkan usulan mereka dan mengambil tindakan cepat dengan mengangkat Kolonel R.E. Martadinata menjadi Kepala Staf. Pada tanggal 10 Oktober 1959, Yos Sudarso diangkat menjadi Deputy I/Operasi. Empat hari kemudian, Yos naik pangkat menjadi Letnan Kolonel, dan kurang dari 3 bulan kemudian, Yos menjabat sebagai Kolonel. Genap 16 bulan setelah itu, pangkatnya naik lagi menjadi Komodor (kini Laksamana Pertama). Sebagai rekan sekerja, Yos ditugaskan untuk mendampingi Mayor R.E. Martadinata di Italia dalam mengawasi pembuatan kapal perang yang dipesan pemerintah RI.

Bersamaan dengan meningkatnya jabatan Yos, keadaan wilayah Indonesia, khususnya Irian Jaya semakin terancam oleh keberadaan Belanda. Pada tanggal 19 Desember 1961, Presiden Soekarno membentuk Tri Komando Rakyat (TRIKORA) sebagai upaya untuk membebaskan Irian Barat dari Belanda.



**Kapal Republik Indonesia (KRI) Banda Aceh-593 merupakan salah satu kapak kebanggaan bangsa Indonesia dari empat kapal Landing Platform Dock produksi PT PAL untuk memperkuat pertahanan TNI Angkatan Laut yang mampu menampung lima helikopter, 22 tank, 20 truk dan 560 pasukan serta 126 awak.**

Pada tanggal 2 Januari 1962, Presiden Soekarno membentuk Komando Mandala Pembebasan Irian Barat yang berkedudukan di Makasar. Sebagai Deputy Operasi, Yos Sudarso memikul tugas yang berat. Pada tanggal 15 Januari 1962, ia mengadakan patroli di daerah perbatasan, yakni di Laut Aru dengan membawa 3 kapal jenis MTB, yaitu KRI Macan Tutul, KRI Macan Kumbang, dan KRI Harimau. Rupanya Belanda sudah mencium strategi Yos, mereka lantas mengejar kapal-kapal milik Indonesia dengan menggunakan kapal perusak (destroyer). Yos Sudarso mengeluarkan perintah untuk bertempur, walaupun lawan yang dihadapi lebih kuat. KRI Macan Tutul di bawah pimpinan Yos Sudarso berusaha menarik perhatian agar 2 kapal lainnya menjauh. Namun, karena kekuatan kapal Belanda dan Indonesia tidakimbang, KRI Macan Tutul pun tenggelam, sedangkan 2 kapal lainnya -- KRI Harimau dan KRI Macan Kumbang, berhasil meloloskan diri. Komodor Yos Sudarso bersama seluruh awak kapal yang ditumpanginya gugur sebagai pahlawan bangsa.

Almarhum Yos Sudarso meninggalkan seorang istri, Siti Mustini, dan 5 anak (dua di antaranya sudah meninggal). Saat itu, anak bungsunya baru berusia 1,5 tahun. Sebagai penghargaan atas jasanya, pemerintah

menaikkan pangkatnya menjadi Laksamana Muda Anumerta Yosaphat Sudarso dan memberinya gelar Pahlawan Nasional berdasarkan SK Presiden RI Nomor 088/TK/1973. Bahkan, namanya pun diabadikan menjadi nama armada angkatan Laut Indonesia, nama pulau, dan nama jalan-jalan protokol di kota-kota besar Indonesia. (*editing: ss/lf*)

Dirangkum dari:

1. Ebitsaja. "Biografi dan Profil Laksamana Muda TNI Yosaphat Sudarso". Dalam <http://id.shvoong.com/humanities/history/2152468-biografi-dan-profil-laksamana-muda/#ixzz1Udb5xvu>.
2. Evawim. "Laksamana Muda Yosaphat Sudarso". Dalam <http://id.shvoong.com/books/biography/2132837-laksamana-muda-yosaphat-sudarso/#ixzz1UbgCCqtu>.
3. \_\_\_\_\_. "Yos Sudarso". Dalam <http://www.jakarta.go.id/jakv1/encyclopedia/detail/3623>.
4. \_\_\_\_\_. "Biografi Laksamana Madya Yos Sudarso". Dalam <http://www.biografitokohdunia.com/2011/02/biografi-laksamana-madya-yos-sudarso.html>.



## Siapa Mendengar Radio Suara SALATIGA ?

Oleh: Drs. Sulistya, M.Si <sup>\*)</sup>

**A**da sebuah pertanyaan menggelitik yang sangat patut untuk dikemukakan : Dalam satu hari berapa jam saudara mendengarkan radio ? atau pertanyaan tersebut dipersempit lagi menjadi berapa jam dalam sehari saudara mendengarkan Radio Suara Salatiga ?

Jawaban atas pertanyaan ini bisa jadi akan sangat mencengangkan kita, karena pastilah sangat bervariasi dan dapat dipastikan bahwa kita sudah lama untuk tidak memilih lagi radio sebagai sarana untuk edukasi, informasi atau hiburan, karena hampir sebagian besar orang sudah berangsur-angsur meninggalkan radio, alangkah ironisnya jawaban atas pertanyaan tersebut, rasanya sungguh tidak adil ketika radio sebagai anak sulung dari Kemerdekaan Indonesia sudah mulai tidak dilirik, tidak didengar bahkan tidak dibahas !

Media Radio Broadcast merupakan salah satu media massa yang tumbuh dan berkembang di dalam rangka untuk memberikan dan menyampaikan informasi, edukasi dan infotainment kepada masyarakat, sebagai media yang sifatnya auditif ( untuk mendengar ) maka karakteristik radio sangat berbeda dengan media cetak atau media visual seperti televisi, salah satu karakteristik radio adalah keserentakan pada waktu yang bersama dapat menjangkau khalayak pendengar dalam waktu yang bersamaan dapat didengar dapat dirilis secara bersama-sama , karena tidak terkendala ruangan dan geografi maka penyampaian informasi melalaui broadcast radio menjadi sangat efektif di telinga siapapun yang sedang tune ini pada frekwensi yang sama , mengingat sifatnya yang sangat auditif maka informasi yang disajikan lewat radio hanya sedikit yang dapat diingat oleh khalayak pendengar, karena sifat memori otak manusia yang sangat sulit mengingat dalam waktu singkat hanya sekali, berbeda dengan media massa seperti media cetak dan media audio visual seperti televisi yang dapat dibaca secara berulang-ulang, salah satu sifatnya yang tidak dimiliki oleh media lain adalah kecepatannya dalam menjangkau audience karena di dalam menejemen pengelolaan radio, para broadcasternya dapat secara langsung mengudara dengan tatabahasa atau editing naskah yang sangat cepat. Maka ketika media massa lain belum maju seperti ini , radio broadcast menjadi sarana komunikasi yang sangat membantu dalam penyiaran-penyiaran informasi terutama program

pemerintah saat itu, seperti sosialisasi program Pertanian dengan berbagai varian penyajinnya atau juga program Keluarga Berencana menemukan ruang kosong melalui radio kepada para aseptomnya saat itu.

Dalam jagat hiburan radio masih sebagai sarana termurah untuk memuaskan hasrat masyarakat pendengarnya dengan berbagai menu yang sangat variatif, mulai dari lagu-lagu , sandiwara radio, ketoprak, dagelan human interest atau wayang dan lain sebagainya semenjak radio itu mengudara sampai dengan radio tersebut off air, di dalam sejarah penyiaran di republik ini radio pernah terjadi trendsetter dalam bidang sandiwara radio yang mengalahkan dunia hiburan lain ketika diperkenalkannya sandiwara radio bersponsor, seperti Butir-butir Pasir di laut di era tahun 1970 an dan pada tahun sesudah itu kita masih mencatat dasyatnya media radio dalam menghadirkan ketagihan masyarakat untuk mendengarkan radio dalam setiap hari lebih dari 30 menit secara serentak dan massal , box office sandiwara radio seperti Misteri Gunung Merapi yang kali pertama lahir berkonsep sandiwara mistis di sebuah lokasi di Sumatra, kemudian di era tahun 80 an terjadi wabah dasyat tiada hari tanpa tidak mendengarkan siaran radio ketika Drama Radio dengan tokoh sentral Brama Kumbara sebagai tokoh fiktif yang berasal dari kerajaan Pajajaran berjudul Saur Sepuh atau kita masih teringat pada saat orang beramai ramai tidak akan mengalihkan frekwensi gelombangnya pada satu stasiun radio ketika ditayangkan kisah garapan SH Mintardja berjudul Nagasasra Sabuk Inten oleh ketoprak Kodam 7 Sapta Mandala Yogyakarta, sebagai andalan menu hiburan yang dibawa radio broadcast pada era tahun 80 an.

Bagaimana dengan sekarang ketika kelahiran teknologi informatika dari Handphone sampai dengan smartphone terlahir dan dunia secara keseluruhan terkoneksi dengan jaringan Internet dan media sosial, pilihan atas hiburan semakin komplit dan dapat dinikmati setiap saat secara personal tanpa harus menunggu jadwal tayang sebuah radio, kemudian kita melihat bahwa radio seharusnya bersyukur atas hadirnya teknologi canggih dunia informatika karena akan dapat juga secara spontan membaginya kepada pendengar ?

### Siapa mendengar Radio Suara Salatiga ?

Adalah radio Suara Salatiga yang setiap hari mengudara on air sejak pukul 05.00 pagi setiap harinya dengan frekwensi 109,66FM merupakan radio

yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Salatiga sejak tahun 1977 pendirian Radio tersebut dimaksudkan sebagai sarana atau media Pemerintah Kota Salatiga menyampaikan informasi dan hiburan kepada pendengar Salatiga dan sekitarnya, sebagai sebuah media yang diharapkan membantu menjaga citra Pemerintah maka manajemen yang diterapkan masih berkuat sekitar bagaimana media tersebut memberikan informasi pembangunan yang telah dilakukan Pemerintah, kehadiran radio RSPD saat itu tidak dimaksudkan sama sekali sebagai sarana komersial untuk menghasilkan keuntungan materi, meskipun tidak dapat dipungkiri ada beberapa sponsorship yang menyewa ruang dan waktu pada saat itu, kegiatan tersebut tidak serta merta menghentikan misi pemerintah sebagai agent of Change di dalam memberikan pendidikan dan hiburan murah segar dan mencerdaskan masyarakat, hasil dari penyewaan atas ruang dan waktu yang disewakan hanya sebatas untuk mencukupi biaya operasional sehari-hari seperti pergantian peralatan yang rusak, operasional penyiar, atau keperluan lain yang tidak tersedia di dalam anggaran. Hal itu semata dilakukan sebagai radio pemerintah yang masih berjalan sesuai dengan Radio Induknya yaitu RRI bahwa radio dipergunakan sebagai sarana perjuangan bangsa.

Selama pengelolaan yang sudah masuk tahun k-47 manajemen radio pemerintah ini telah melakukan berbagai upaya untuk tetap eksis di udara, baik dikelola langsung oleh Pemerintah dengan arahan dan di bawah Bagian Humas Setda sampai dengan dikerjasamakan dengan pihak pengelola dari swasta namun misi utamanya yaitu menjadikan Radio tersebut sebagai sarana pemerintah Salatiga di dalam rangka to inform, to educate dan to entertain masyarakat, sedangkan porsi dan waktu yang dipakai dalam rangka penyiaran mengalami beberapa perubahan pula tergantung dari siapa manajemen saat itu, ketika swasta diberikan hak pengelolaan maka hak yang didapatkannya adalah mencari donasi dari sewa ruangan yang dilakukan oleh perusahaan swasta maupun personal pemakai jasa radion Suara Salatiga.

Pada tahun 2011 Legal standing point radio penyiaran Publik ini dipertanyakan kembali seiring dengan diterbitannya Undang-undang mengenai Lembaga penyiaran Publik, Radio suara Salatiga berbenah dan dengan segala kemampuan untuk tetap sekali di udara tetap diudara Pemerintah Kota Salatiga, status ini sangat diperlukan untuk memperkuat komitmen atas lembaga penyiaran publik agar dapat berkembang seiring dengan tuntutan jaman dan ditata dengan manajemen yang sehat sebagai penyokong asas transparansi, akuntabilitas dan berdasarkan hukum, namun pembahasan apakah standing legalnya masih belum diketemukan apakah memakai sistem Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) ataukah dapat dipersamakan sebagai BUMD? kedua-duanya nampaknya tidak dapat memberi alas hukum yang kuat untuk keberadaan Suara Salatiga, sebagai

sebuah institusi penyiaran maka keberadaan dasar hukum perlu dipertegas oleh Kementerian Informasi dan Komunikasi di Jakarta guna menjamin keberadaan radio milik Pemerintah ini.

### **Karakteristik Pendengar Radio**

Radio sebagai sarana penghibur masyarakat yang pendengarnya anominitas dan tersebar di wilayah pancar siarnya, kehadiran radio Suara Salatiga diharapkan dapat memberikan harapan-harapan pendengarnya yang sangat heterogen, karena sifatnya yang anominitas dan heterogen maka masyarakat pendengar sangat selektif, artinya masyarakat dapat dalam waktu sekejap memindahkan gelombang frekwensi manakala kebutuhan informasinya tidak terpenuhi, dia akan segera menggeser gelombang dengan "kejam" pada acara tertentu dan akan pindah ke lain channel radio, karena sifatnya itulah maka rubrik-rubrik tertentu dengan segmen tertentu kadangkala menjadi andalan, pertanyaan yang sama ditujukan kepada Suara Salatiga. Apakah rubrik andalan Suara Salatiga tersebut? pemetaan pendengar berdasarkan survey atas agenda setting radio perlu dilakukan untuk tetap mempertahankan rubrik dan segmentasi yang dikehendaki. Selain sifatnya yang selektif pendengar juga merupakan kelompok yang memiliki sifat pembosan atas rubrik yang tidak memberikan pembaruan (novelty) atas kebutuhan mereka, misalkan tentang acara yang diulang-ulang tanpa memperhatikan kejenuhan pendengar, maka bisa jadi radio itu pasti akan ditinggalkan khalayak pendengar.

### **Suara Salatiga sebagai penjaga pagar Budaya**

Berapa menit dalam seminggu Suara Salatiga memberikan waktu bagi pengembangan budaya Lokal? pertanyaan ini penting dilakukan karena radio milik Pemerintah adalah salah satu penjaga nilai-nilai yang ada untuk tetap eksis dan diturunkan pada generasi mendatang, upaya ini dilakukan guna mengimbangi menguatnya pengaruh budaya barat yang tidak mungkin terbendung lagi kecuali terdapat penguatan budaya lokal, seperti ketoprak, wayang, wayang orang, wayang purwa dan kesenian-kesenian tradisional lain yang sangat diharapkan dapat dipertegas kembali struktur budaya kita. Memang di dalam merelay sebuah siaran secara Live diperlukan biaya atau ongkos operasional begitu mahal untuk dapat sampai ke tengah ruangan para pendengar, bahkan untuk menyajikan siaran wayang purwa semalam suntukpun juga memerlukan biaya operasional yang tinggi baik untuk kapasitas listrik dan sumber daya lainnya, namun ke depan perlu dilakukan oleh Suara Salatiga agar fungsi radio sebagai penjaga budaya tidak bergeser.

***Penulis adalah Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Salatiga pengamat media massa dan pengamat seni.***

## Tanam Nilai Wasbang perlu Target yang Tepat

**A**nggota DPRD Salatiga, Ir. Hj, Adriana Susi Yudhawati, M.Pd mengingatkan kepada Pemerintah Kota Salatiga selaku pelaksana kegiatan penanaman nilai wawasan kebangsaan dan sejenisnya agar tidak asal-asalan.

Dalam hal ini, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) memang sudah rutin mengadakan kegiatan tentang penanaman empat pilar kebangsaan. Biasanya peserta adalah siswa SMA dan setingkatnya dan juga perwakilan tokoh masyarakat.

"Saya minta Kesbangpol mentargetkan sasaran yang tepat, misalnya para guru yang mengampu mata pelajaran PKN. Dengan begitu ada dampak yang didapat, murid akan mendapatkan sosialisasi dari gurunya. Siswa tetap harus mendapat materi tersebut, namun para guru lebih penting, karena guru bisa mentransfer apa yang didapati dari kegiatan tersebut," komentar Susi.



**Ir. Hj. Adriana Susi Yudhawati, M.Pd**

"Dengan demikian kegiatan yang dilaksanakan tidak terkesan asal terlaksana, tapi targetnya benar-benar tercapai." tambahnya.

Tokoh masyarakat dan tokoh agama juga perlu, karena mereka bisa mensosialisasikan nilai-nilai Wasbang kepada masyarakat di sekitarnya. "Tokoh masyarakat dan tokoh agama adalah sosok yang cakap dalam memberikan pencerahan terhadap masyarakat luas," jelas anggota dewan dari PDIP ini. (lf/ss)



**Taufiq Eko Priyatno**

## Mengatasi Kelangkaan Air Bersih

**A**kibat musim kemarau yang menyebabkan langkanya air bersih, perlu adanya penampungan air (embung). Demikian yang disampaikan Taufiq Eko Priyatno Wakil Rakyat Kota Salatiga dari Partai Demokrat.

Lebih lanjut dikatakan bahwa dengan adanya embung itu akan mampu menyimpan air sewaktu musim penghujan dan bisa dimanfaatkan saat kemarau tiba. "Dengan ketersediaanya air maka masyarakat yang rata-rata berprofesi sebagai petani maupun peternak akan mampu mencukupi kebutuhan pengairan tanaman dan kebutuhan air untuk ternaknya" tambah Taufiq Eko Priyatno.

Taufiq berharap agar pemkot segera menyiapkan kebutuhan pembangunan embung. Hal ini menurutnya juga harus diiringi dengan sosialisasi mengenai embung kepada masyarakat. Kedepan pengetahuan tentang embung harus ditingkatkan agar masyarakat tidak takut kalau jebol bisa banjir.

Taufiq menghimbau agar skala embung disesuaikan dan dihitung betul hingga kemanfaatannya bisa maksimal, dan jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan juga tidak membahayakan.

"Ketika musim kemarau, warga di beberapa daerah di Salatiga memang kesulitan mendapatkan air bersih, dan hal ini sudah menjadi agenda tahunan. Jadi membuat embung sama saja dengan menabung, ketika membutuhkan tabungan tersebut bisa dimanfaatkan," tambah Taufiq. (lf/ss)

## Revitalisasi Terminal Tamansari

Pemkot Salatiga akan merevitalisasi terminal angkot Tamansari dengan membangun lebih besar lagi tahun depan. Langkah tersebut untuk mengurangi kesemrawutan lalu lintas angkot di lokasi tersebut.

Wakil Rakyat Kota Salatiga Hj. Riawan Woro Endartiningih, SE, memberikan keterangan bahwa Dinas Perhubungan Komunikasi, Budaya dan Pariwisata Salatiga telah menganggarkan sekitar 8,3 miliar rupiah.

Karena terminal yang tidak layak tersebut banyak para awak angkot yang ngetem di didepan mal Tamansari. Beberapa awak angkot mengaku jika mereka mencari penumpang di dalam terminal tidak akan memenuhi target setoran kepada pemilik angkot.

Sementara itu DPRD Kota Salatiga mendukung pembangunan terminal angkot Tamansari agar bisa mengurangi kesemrawutan lalu lintas di pusat kota



Foto: boedy's

### Hj. Riawan Woro Endartiningrum, SE

tersebut. Bukti dukungan tersebut adalah telah disetujuinya anggaran pembangunan.

"Saya menghimbau agar sarana yang ada menunjang atau berpihak kepada para awak angkot juga kepada para penumpang. Tempat tunggu juga harus nyaman. Selain itu keamanan terminal juga harus terjaga karena tempat semacam itu seringkali menjadi lokasi kejahatan," harap Riawan Woro. (lf/ss)



Foto: boedy's

### Bagas Aryanto, SP

## Pelaku UMKM Perlu Pendampingan

Anggota dewan dari dapil Sidomukti, Bagas Aryanto, SP berharap agar pemerintah memberikan pendampingan terhadap usaha mikro kecil menengah (UMKM) yang ada di Salatiga. Hal ini guna meningkatkan kemampuan manajerial para pelaku usaha mikro kecil menengah agar dapat mengimbangi kemampuan pengusaha dengan skala besar.

"Pendampingan bagi pelaku UMKM di Salatiga sangat penting agar keberlangsungan usaha mereka terus terjaga. Kasihan warga bila harus bergonta-ganti profesi hanya disebabkan usaha yang dijalankan selalu mengalami kegagalan," pinta Bagas.

Bagas juga berharap agar barang-barang produksi lokal bisa masuk ke minimarket atau toko-toko modern yang ada di Salatiga. "Ini menjadi tugas Pemkot agar produk hasil olahan dari UMKM mampu memenuhi standar mutu yang disyaratkan oleh pihak toko modern. Pemkot juga harus menerapkan kebijakan untuk setiap toko modern agar menyediakan stan bagi produk lokal," harap Bagas.

Dengan begitu, pemberian pelatihan bagi para pelaku UMKM, dinilai akan mampu meningkatkan mutu hasil olahan. Bila kualitas olahan bagus tentu akan mudah masuk ke toko modern.

Pelatihan keterampilan mengolah produk dan pelatihan manajerial keuangan perlu diprioritaskan. "Pelaku UMKM biasa mencampur antara uang usaha dan uang belanja, adalah awal dari ketidakberhasilan suatu usaha. Masyarakat UMKM harus mendapatkan pelatihan manajemen keuangan" tandas Bagas. (lf/ss)

## Memperhatikan Pelestarian Mata Air

**A**nggota DPRD Kota Salatiga, Drs. Sarmin berharap pemerintah Kota Salatiga memperhatikan kebutuhan air warga dan melestarikan mata air yang ada di lingkungannya. Sarmin mencontohkan sumber mata air yang ada di dukuh Batur Kauman Kidul. Masyarakatnya masih menjaga tradisi bersih-bersih kampung dilanjutkan dengan selamatan. Menurut Sarmin tradisi tersebut sudah turun-temurun, tumbuh di tengah-tengah warga, kebiasaan baik tersebut perlu terus terjaga.

“kegiatan bersih-bersih belik atau mata air yang ada dipinggir dukuh Batur menurut saya sangat baik. Kalau perlu mata air yang ada dibuatkan bak atau tandon yang tinggi sehingga bisa dimaksimalkan pemanfaatannya. Dengan pompa air maka air akan bisa dinaikkan ke tandon dan bisa didistribusikan ke rumah-rumah warga,” papar Sarmin.



**Drs. Sarmin**

Pemkot hendaknya memikirkan hal itu, tersebut agar masyarakat bisa menikmati. Jika masyarakat mengkonsumsi air yang bersih tentunya mereka akan sehat, namun jika air yang diminum kurang bagus tentu akan mempengaruhi kesehatan warga.

Sarmin menilai bahwa mata air yang terus dimanfaatkan dan dirawat rutin dan dibersihkan maka akan terjaga. Pohon-pohon disekitar juga perlu dipelihara dan dipertahankan.

“ini adalah tanggungjawab bersama, mata air bila dibiarkan akan berhenti mengeluarkan air, dan pemkot juga akan kesusahan untuk mencukupi kebutuhan air ke depannya”, tandasnya. (lf/ss)



**Agus Joko Setiawan**

## Salatiga Bebas Jalan Lubang

**W**akil Rakyat Salatiga, Agus Joko Setiawan membrikan informasi bahwa Dinas Bina Marga dan PSDA Kota Salatiga mengajukan tambahan anggaran 17 miliar rupiah dalam APBD perubahan 2014.

Pengajuan tersebut dilakukan untuk bisa menutup seluruh kegiatan yang diajukan serta mengantisipasi jika ada keadaan darurat seperti jembatan roboh.

Pihak Dewan mengimbau Kepala Dinas Binamarga dan PSDA agar pengajuan anggaran tersebut dilakukan setelah melakukan survei ke semua kelurahan yang ada di Salatiga. Menurut informasi dari dinas tersebut, saat ini di Salatiga ada 60 ruas jalan yang diaspal dengan menggunakan aspal hotmix. Semua pengaspalan dibagi dalam tujuh paket proyek. Namun dipastikan jalan milik provinsi dan milik pemerintah pusat tidak akan diperbaiki meskipun kondisinya kurang baik.

Menurut dewan, meski ada beberapa ruas jalan yang bukan wewenang pemkot Salatiga hendaknya pemkot mengambil langkah yang tepat. Pihak Dinas Binamarga dan PSDA harus tetap menyampaikan permohonan kepada yang berwenang provinsi dan pusat dalam hal ini untuk memperbaikinya.

“Memang, ada beberapa ruas jalan provinsi yang tidak menjadi tanggung jawab pemkot antara lain: jl Ahmad Yani, Hasanuddin, Pattimura. Sementara ruas jalan milik pusat adalah: jl. Osamaliki, Sukarno Hatta, Veteran, Wahid Hasyim, Diponegoro dan Jenderal Sudirman”, tandas Agus Joko Setiawan. (lf/ss)

## Anggota Dewan Optimalkan Pengawasan

**L**atif Nahari, ST anggota komisi C DPRD Kota Salatiga berkeinginan mengoptimalkan fungsinya sebagai dewan dalam hal pengawasan. Ia berharap fungsi pengawasan yang menjadi tugas institusinya bisa dilaksanakan secara baik dan maksimal.

Termasuk didalamnya pengawasan pekerjaan atau proyek yang tengah dikerjakan oleh pemborong. Komisi C DPRD telah melakukan beberapa inspeksi mendadak ke lokasi proyek yang ada.

Latif menilai hak masyarakat adalah bisa menikmati hasil pembangunan yang dilaksanakan, bila bangunan fisik tidak bagus karena pengerjaannya tidak maksimal masyarakat tidak bisa menikmati hasil pembangunan yang ada.

“Saya tekankan bahwa kualitas yang bagus pada suatu pekerjaan akan menguntungkan kedua pihak,



Foto: boedy's

**Latif Nahari, ST**

pemborong maupun masyarakat” tekannya.

Menurut Latif Nahari, proses pembangunan yang dilaksanakan di lingkungan warga masyarakat sedikit banyak akan mengganggu aktifitas warga, dan jika hasilnya jelek tentu akan mengganggu dua kali.

“Pemkot harus memberikan peringatan kepada para pemborong yang tidak serius dalam mengerjakan suatu pekerjaan.”,pinta Latif. (lf/ss)



Foto: boedy's

**KH. Muh. Syafi'i**

## Sidak Komisi, Mutu Kurang baik

**K**omisi C DPRD Kota Salatiga mengadakan sidak ke beberapa proyek di Salatiga. Menurut anggota Komisi C KH. M. Syafi'i, pekerjaan yang dilakukan oleh pemborong kualitasnya kurang baik.

“Saya dan teman-teman menilai hasil pekerjaan yang dilaksanakan pemborong tidak bagus kualitas maupun mutunya. Target waktu pekerjaan juga belum maksimal, hingga bulan Oktober saja masih ada proyek yang hasil pengerjaannya belum nampak,” ungkapny.

HM. Syafi'i menilai peran masyarakat dalam proses pembangunan harus dilaksanakan, baik dari proses perencanaan maupun saat pekerjaan berlangsung. “Masyarakat selayaknya boleh ikut mengawasi utamanya warga sekitar yang menjadi sasaran proyek. Warga yang akan menggunakan sarana tersebut berhak untuk melapor jika ada kesalahan dalam pekerjaan,” imbuh HM. Syafi'i.

“Masyarakat perlu mengerti dan paham bagaimana syarat-syarat proyek yang baik, kuat, kokoh dan tahan lama. Karena jika kualitas bangunan yang dilaksanakan tidak bagus mereka juga nanti yang akan menerima hasilnya. Hasil pekerjaan yang ada di wilayahnya cepat rusak dan tentunya merepotkan warga sendiri. Jika talut yang dikerjakan tidak bagus kemudian rusak kembali maka jalan pun tidak nyaman, belum lagi jika hujan tiba, makin tambah rusak lagi pastinya,” pungkas HM. Syafi'i. (lf/ss)

## Kelas di RSUD Perlu Diganti Namanya

**A**danya Rumah Sakit adalah untuk memberikan pelayanan kesehatan agar derajat kesehatan masyarakat kita dapat meningkat.

Menurut Anggota DPRD Kota Salatiga dari fraksi Karya Pembangunan, Sudiyono menilai bahwa nama kelas yang ada di RSUD saat ini kurang tepat. Nama kelas yang ada saat ini mendiskriminasi masyarakat. "Idealnya sebuah rumah sakit itu tidak ada diskriminasi" katanya.

Diketahui bahwa di RSUD Salatiga kelas perawatannya terbagi atas kelas IA, IB, IC, KELAS II, KELAS III dan one day care. Selain itu juga terbagi dalam perawatan ICU, HCU, VVIP dan VIP.



Foto: boedy's

**Sudiyono**

"Lebih baik di rumah sakit itu tidak diberi nama kelas I, II, III ataupun VIP dan VVIP. Misalnya diberi nama kelas cempaka. Walaupun kelasnya sama akan tetapi secara psikologi kelas dengan kata cempaka akan lebih baik dibanding dengan kelas III, meskipun mungkin biayanya sama" kata Sudiyono.

Sudiyono berharap agar pelayanan di RSUD dapat mengadopsi motto DPRD, yaitu Melayani Tanpa Diskriminasi.

"semoga motto melayani tanpa diskriminasi ini dapat di turunkan ke dinas maupun instansi di kota salatiga, khususnya yang memberikan pelayanan umum, seperti RSUD", tutup Sudiono. (ss/lb)



Foto: boedy's

**dr. Suryaningsih. M.Kes**

## Kurangi Beban SKPD yang Gemuk

**P**embangunan yang dilaksanakan pemerintah harus berjalan serta dana juga terukur pencapaiannya. Maka SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) sebagai pelaksana harus seimbang, meski tidak dipungkiri masih ada beberapa Dinas yang terlalu gemuk.

Besar kecilnya suatu Dinas memang untuk efisiensi namun ternyata juga menimbulkan dampak tersendiri. Yaitu tidak maksimalnya para pegawai dalam melakukan tugasnya. Hal itu disebabkan karena banyaknya pekerjaan yang harus dilaksanakan.

Selaku anggota Komisi A, yang ia soroti adalah terlalu banyaknya tupoksi dari Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan Ketahanan Pangan dan Keluarga Berencana (Bapermas PKP dan KB).

"Seharusnya bidang ketahanan pangan dipindah atau dikelompokkan dengan bidang penyuluhan yang ada. Banyaknya tupoksi mengakibatkan kreatifitas pegawai jadi berkurang", katanya.

"Jangan sampai ini berlanjut terus, pelayanan kepada masyarakat harus menjadi prioritas. Jika SKPD terlalu gemuk para pegawai akan sibuk dalam hal yang bersifat di atas meja seperti perencanaan hingga pertanggungjawaban atau SPJ suatu kegiatan," imbunya. (lf/ss)

# Arfian Fuadi dan Arie Kurniawan Berhasil Mendesain *Jet Engine Bracket*



Foto: IM, Salsahyl And

**Arfian Fuadi dan Arie Kurniawan, dua pemuda asal Salatiga, ini berhasil mendesain jet engine bracket.**

**M**esin jet adalah sebuah perangkat rumit yang dibuat dalam berbagai bentuk, tetapi memiliki banyak komponen yang sama. Mesin Jet merupakan salah satu peralatan penghasil tenaga untuk pesawat terbang.

Jika dibandingkan dengan pesawat terbang yang bermesin propeler, maka pesawat dengan mesin jet bisa memberikan kecepatan pesawat yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan pesawat terbang yang bermesin propeler.

Prinsip dasar mesin jet adalah pembakaran yang menghasilkan panas dan temperatur yang tinggi. Akibat adanya panas dan temperatur yang tinggi tersebut, kecepatan udara yang keluar dari tempat pembakaran sangat cepat, dan ini berarti memberikan tenaga yang besar juga.

Arfian Fuadi dan Arie Kurniawan, dua pemuda lulusan SMA Negeri 7 Semarang dan SMK Negeri 2 Salatiga, Jawa Tengah, ini berhasil mendesain jet engine bracket sekaligus menyisihkan 700 karya dari 50 negara peserta yang mengikuti kompetisi tersebut.

*Jet engine bracket* merupakan salah satu komponen untuk mengangkat mesin pesawat terbang yang paling ringan dari komponen serupa yang pernah dibuat di dunia. Bahkan, mereka berhasil mengalahkan peserta dengan gelar Ph.D dari Swedia yang menyabet peringkat kedua serta insinyur lulusan *University of Oxford* yang meraih juara ketiga.

Adapun keunggulan *jet engine bracket* yang didesain Arfian dan Arie adalah komponennya yang hanya berbobot 327 gram atau 84 persen lebih ringan dari pasca proses pembuatan cetak biru atau prototipe *Jet engine bracket* saat ini yang seberat 2 kilogram.

## Jualan Susu dan Tukang Tambah Ban

Yang lebih menarik lagi, sebelum berkecimpung di dunia desain *engineering* mereka berdua adalah pedagang susu dan tukang tambah ban. Kehidupan ekonomi keluarga yang tidak mencukupi membuat mereka harus bekerja apa saja untuk mendapatkan penghasilan.

Rumahnya sudah hampir rubuh, sehingga mereka membutuhkan pekerjaan. Dari kecil memang mereka sudah mulai berwirausaha, bahkan pernah jualan susu, pernah juga jadi tukang tambah ban.

Memang Arfian dan Arie tak memiliki latar belakang akademis di dunia desain *engineering*. Arfian yang lahir pada 2 Juli 1986 lulusan SMA, sedang Arie yang lahir pada 11 Juli 1991 lulusan SMK jurusan otomotif.

Arfian lah yang pertama-tama tertarik dengan dunia *engineering*. Ia semata-mata hobi, belajar sendiri dengan meminjam komputer milik sepupunya, karena baginya komputer adalah barang yang amat mewah yang tidak mungkin mereka miliki.

Arie mengenal *desain engineering* dari kakaknya. Proyek pertama membuat desain dimulai dari seringnya mengunjungi salah satu situs tempat para klien mereka berkumpul dan berbincang di dunia maya.

Pada tahun 2005, proyek pertama yang mereka kerjakan adalah membuat jarum untuk alat ukur yang berfungsi sebagai alat medis. Pemesannya adalah perusahaan asal Jerman. Mereka mendapat honor perdana sebesar 10 dollar AS atau sekitar Rp 90 ribuan kala itu.

Sejak proyek pertama itu, mereka terus mendapat permintaan untuk membuat desain-desain alat-alat lain yang semakin canggih. Bahkan, mereka sempat ditawarkan membuat senjata namun mereka menolak karena senjata dapat digunakan untuk tindakan kriminal.

Selanjutnya, mereka juga pernah membuat desain pesawat ringan yang dipesan oleh perusahaan asal Amerika Serikat. Mereka mendapat bayaran ribuan dollar dari proyek itu.

Kini Mereka adalah pemilik usaha Dtech Engineering, bisnis jasa desain yang mendunia. Mereka melayani pemesanan desain tiga dimensi dari seluruh penjuru bumi. (**ss/est**)

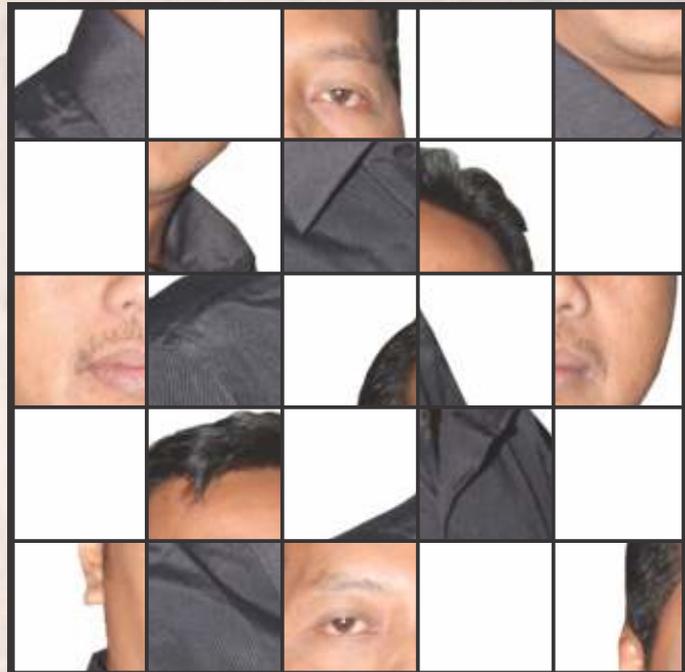
## TEBAK WAJAH JIWARAGA 24

Total Hadiah senilai Rp. 250.000,00  
untuk 5 orang Pemenang @ Rp. 50.000,00

### KETENTUAN MENEBAK :

1. Susunlah penggalan foto salah seorang anggota DPRD Kota Salatiga ini di kartu pos sehingga membentuk foto aslinya secara utuh.
2. Sebutkan identitas namanya.
3. Cantumkan Kupon Tebak Wajah Jiwara 24 yang telah disediakan.
4. Jawaban dikirim ke kantor Redaksi Majalah Jiwara, dengan alamat Sekretariat DPRD Kota Salatiga, Jalan Letjend. Sukowati Nomor 51 Salatiga.
5. Tulis nama dan alamat lengkap pengirim.
6. Jawaban diterima Redaksi majalah Jiwara paling lambat tanggal 7 Desember 2014.
7. Akan diundi 5 (lima) orang pemenang masing-masing berhak mendapat hadiah senilai Rp. 50.000,00.
8. Pemenang akan diumumkan pada Majalah Jiwara Edisi IV Tahun 2014
9. Pemenang dapat mengambil hadiah di Kantor Redaksi dengan menyertai foto copy identitas diri.

**KUPON TEBAK WAJAH JIWARAGA 24**



**Ir. Hj, Adriana Susi Yudhawati, M.Pd**

**Jawaban Tebak Wajah  
Jiwaraga 23 :  
Ir. Hj, Adriana Susi Yudhawati, M.Pd**

### **PEMENANG TEBAK WAJAH JIWARAGA 23**

1. **NATALIANO TEGAR PRATAMA**  
SMP Negeri 6 Salatiga.
2. **ATIQOH**  
BAPPEDA Kota Salatiga
3. **CAROLINA ANGGRAINI**  
Bulu RT.6 Tegalrejo - Salatiga
4. **DANANG SETYO NUGROHO**  
Bendosari RT.04/05 Kumpulrejo - Salatiga
5. **AGUSTINA MARGA NINGRUM**  
SMK Islam Sudirman Tingkir - Salatiga

*Foto: ss/lf*



## Kunjungan Komisi A DPRD ke SD Negeri Sidorejo Lor 3 Salatiga

Foto: boedy's



Foto: boedy's

Ketua DPRD Salatiga M. Teddy Sulistio, SE bersama segenap anggota Komisi A mengunjungi SD Sidorejo Lor 03. Dalam kunjungan tersebut Ketua DPRD berkenan menjadi pembina upacara.

Dari kunjungan itulah DPRD Salatiga khususnya komisi A menggagas penganggaran untuk pengadaan bus sekolah.

Bus itu nantinya untuk mengantar siswa untuk berlatih olahraga di lapangan maupun Stadion Kridanggo.

Menurut Komisi A, masih banyak persoalan di dunia pendidikan di Salatiga. diantaranya masalah infrastruktur yang belum memadai.

Selain itu fasilitas penunjang kurikulum 2013 juga masih belum memadai seperti ketersediaan layar proyektor untuk pembelajaran yang baru tersedia di 40 persen dari 110 SD di Salatiga. menurut Komisi A DPRD Salatiga, hal ini perlu mendapat perhatian demi peningkatan pendidikan(ss/lf).

